



CORAL GOVERNANCE

Victor PH Nikijuluw | Luky Adrianto | Dietriech G. Bengen |
M. Fedi A. Sondita | Daniel Monintja | Hendra Yusran Siry
| Pahala Nainggolan | Handoko Adi Susanto | Rony Megawanto |
Alan F. Koropitan | Imran Amin | Budy Wiryawan | Rilus A. Kinseng
| Nimmi Zulbainarni | Siti Hajar Suryawati | Agus Heri Purnomo
| Rili Djohani | Johannes Subijanto






CORAL TRIANGLE
INITIATIVE
ON CORAL REEF, FISHERIES AND FOOD SECURITY
INDONESIA

The Nature
Conservancy 
Protecting nature. Preserving life.™

 CORAL
TRIANGLE
CENTER
Ensuring Coral Reefs for Life

MPAG

MARINE
PROTECTED
AREA
GOVERNANCE

CONSERVATION INTERNATIONAL   The Nature
Conservancy  WWF



Coral Governance



CORAL GOVERNANCE

Untuk Sitasi:

Indonesia National Coordinating Committee

Coral Triangle Initiatives on Coral reefs, Fisheries and Food Security 2013.

Coral Governance

532 halaman

Copyright © 2013 Sekretariat Nasional CTI-CFF Indonesia

Penyunting : Victor PH Nikijuluw
Luky Adrianto
Nia Januarini
Desain Sampul : Sani Etyarsah
Tata Letak : Sani Etyarsah
Ardhya Pratama
Ilustrasi Sampul : all-free-download.com

Penerbit IPB Press

Kampus IPB Taman Kencana Bogor

Cetakan Pertama : Oktober 2013

Buku ini merupakan hasil kontribusi dari beberapa lembaga, pemerintah dan non-pemerintah serta akademisi. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam buku ini tidak mencerminkan pandangan dari Pemerintah Indonesia.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pencarian atau ditransmisikan dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun - elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman atau lainnya tanpa izin dari Sekretariat Nasional CTI-CFF Indonesia.

ISBN: 978-979-493-580-4

Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
salam sejahtera untuk kita semua.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki lebih dari 17.000 pulau membentang di khatulistiwa, dengan garis pantai lebih dari 95.000 km. Terumbu karang di perairan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi dan dianggap salah satu yang paling indah di dunia. Terumbu karang tidak hanya cantik karena mereka adalah rumah bagi ribuan spesies laut yang keduanya penting secara sosial dan ekonomis. Terumbu karang juga berfungsi sebagai perlindungan utama bagi garis pantai untuk mencegah erosi selama badai, dan lebih inshore habitat seperti hutan bakau dan padang lamun.



Indonesia terletak di jantung “Segitiga Terumbu Karang” dan memiliki kawasan terumbu karang terbesar di negara manapun di dunia. Sayangnya, aktivitas manusia telah menempatkan tekanan besar pada ekosistem yang rapuh dan telah menyebabkan terjadinya degradasi terumbu karang yang serius, sebagian besar melalui penangkapan ikan yang merusak, penangkapan ikan berlebihan, pemanasan global, penambangan karang, pencemaran, sedimentasi dan penipisan gizi. Akibatnya, hanya sekitar 6 persen dari terumbu karang di negara ini tetap dalam kondisi sangat baik.

The 2009 Manado Ocean Declaration dan Deklarasi Pemimpin CTI pada Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan menekankan perlunya strategi nasional untuk pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang memberikan barang dan jasa yang berharga dan yang memiliki potensi yang signifikan untuk mengatasi berbagai efek dari perubahan iklim. Negosiasi di Manado yang kontroversial dan terfokus pada lingkungan dan hubungannya dengan ekonomi nasional. Keseimbangan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan konservasi alam yang sangat menantang, dan membutuhkan bimbingan yang tepat dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen.

Pelestarian aset-aset alam yang luar biasa dan mencegah penurunan lebih lanjut akan memerlukan tindakan berani dan komitmen politik di semua tingkatan. Beberapa aksi prioritas utama telah menunjukkan kemajuan dan merekam berbagai pencapaian yang progresif di tingkat nasional dan regional dalam pencapaian tujuan CTI-CFF *Regional Plan of Actions* (RPOA) dan *National Plan of Actions* (NPOA) akhir-akhir ini. Diantaranya, **Pertama**, tentang pengelolaan bentang laut. Indonesia melaksanakan serangkaian karakterisasi ilmiah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan bentang laut dengan isu lintas batas potensial. **Kedua**, tentang pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, ditempuh Indonesia bersama negara lain dengan menyepakati resolusi perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi (*Live Reef Fish Food Trade*) yang mendorong terciptanya pola perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan bagi pelaku usaha serta kelestarian sumberdaya di Kawasan Segitiga Karang. **Ketiga**, membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan perlindungan laut. Indonesia telah memiliki Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seluas 15,5 juta hektar dari target komitmen 20 juta ha pada tahun 2020. Saat ini sedang dilakukan penetapan kelembagaan dan penyusunan rencana pengelolaan menuju pengelolaan yang efektif. Terkait dengan hal tersebut, untuk menilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, Indonesia telah menetapkan alat berupa Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) serta peraturan tentang Standar Kompetensi Khusus untuk pelatihan konservasi. Hal ini juga telah mengidentifikasi perikanan berkelanjutan dan pengelolaan wilayah pesisir terpadu sebagai tujuan pelengkap. Perjanjian pengelolaan bersama masyarakat dengan pemerintah daerah, kemitraan publik-swasta dan program kemitraan internasional akan diminta untuk menyediakan diperlukan kepemimpinan, inovasi dan pembiayaan untuk memajukan dan mempertahankan usaha ini.

Terkait dengan semua itu, buku "*Coral Governance*" ini menawarkan suatu kurikulum baru dalam sistem penata-kelolaan sumberdaya alam laut, terutama terkait ekosistem terumbu karang dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan acuan dasar dalam pengambilan keputusan para dosen di tingkat daerah, nasional maupun regional.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 1 Oktober 2013

Sharif C. Sutardjo
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Pengantar Editor

Inisiasi penyusunan buku ini bermula dari sebuah pertanyaan penting yang muncul dari komunitas tata kelola pesisir dan laut dan khususnya terkait dengan kegiatan segitiga terumbu karang (*Coral Triangle*) di Indonesia yaitu : “bagaimana kita mampu merespon ancaman keberlanjutan dari ekosistem terumbu karang di Indonesia melalui pelestarian saat yang sama kelestarian ekosistem tersebut dapat pula mensejahterakan masyarakat yang tergantung langsung maupun tidak langsung dengan ekosistem terumbu karang”. Dalam konteks itu lah maka jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak dapat dilakukan hanya oleh satu dua pihak, namun harus merupakan jawaban yang muncul dari usaha bersama semua pihak. Lebih khusus lagi, jawaban tersebut harus berdasarkan pengetahuan ilmiah dari berbagai ilmu pengetahuan (transdisiplin) yang adaptif dengan perkembangan masalah empiris di dalam konteks ekosistem terumbu karang, baik dari aspek bio-ekologi dan ekosistem terumbu karang, maupun aspek yang terkait dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat yang tergantung pada ekosistem terumbu karang. Selain itu, dinamika ekologis dan sosial ekonomi tersebut harus diantisipasi dalam sebuah kerangka pengelolaan yang menjamin keberlanjutan ekosistem terumbu karang dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen penting dari kerangka pengelolaan tersebut adalah sebuah bentuk tata kelola terumbu karang (*coral governance*).

Coral Triangle Initiative (CTI) adalah sebuah inisiatif regional yang beranggotakan 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Solomon Islands. Inisiatif regional ini terkait dengan pentingnya peran ekosistem terumbu karang yang secara geografis terletak di wilayah 6 negara tersebut dan membentuk sebuah “segitiga terumbu karang” (*coral triangle*). Pada tahun 2009, Deklarasi CTI dilaksanakan di Manado untuk meningkatkan kerjasama antar pihak dalam konteks penguatan tata kelola terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang tersebut. Indonesia

sebagai negara yang memiliki luas terumbu karang sebesar 50.000 km² adalah negara yang memiliki luas paling besar di antara ke-6 negara segitiga terumbu karang. Hal ini membuat Indonesia memiliki posisi penting dalam setiap pengambilan keputusannya. Dengan kata lain, sudah seharusnya Indonesia perlu memiliki komitmen yang lebih kuat di banding anggota CTI lainnya khususnya dalam kaitannya dengan proses tata kelola terumbu karang. Proses dan dinamika tata kelola terumbu karang tersebut tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kolaborasi antara pengambil kebijakan dan “civil society” yang terkait dengan tata kelola terumbu karang yaitu pengguna sumberdaya dan ekosistem terumbu karang, komunitas sains dan lembaga non-pemerintah. Kerangka jejaring sains-kebijakan (*science-policy networks*) tersebut memerlukan informasi dan referensi yang dapat dijadikan dasar bagi implementasi tata kelola terumbu karang secara praksis dan empiris. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka NCC-CTI menginisiasi penyusunan sebuah dokumentasi ilmiah dalam bentuk Buku Tata Kelola Terumbu Karang (*Coral Governance*).

Sebagai sebuah proses transdisiplin, buku ini berusaha memuat semua aspek yang terkait dengan tata kelola terumbu karang. Kami mengundang 18 penulis dengan berbagai latar belakang keilmuan maupun institusi untuk berkontribusi dalam penulisan buku ini. Secara substansi, buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian 1 memuat prinsip, teori dan paradigma tata kelola sumberdaya laut khususnya tata kelola terumbu karang. Bagian ini terdiri dari 4 Bab yang memuat perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya alam (Bab 1), kemudian diikuti dengan *theoretical foundation* dari tata kelola sumberdaya khususnya terumbu karang (Bab 2), lalu dilanjutkan dengan Bab 3 yang mengupas aspek bio-ekologi terumbu karang. Bagian ini diakhiri oleh deskripsi analitik terkait dengan pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang dimuat pada Bab 4.

Bagian kedua buku ini adalah memuat aspek penting dari tata kelola terumbu karang yaitu prinsip-prinsip tata kelola. Pada Bagian 2, aspek-aspek yang terkait dengan prinsip dan pendekatan tata kelola terumbu karang diuraikan dengan cukup rinci, dimulai dari pengelolaan perikanan karang berbasis ekosistem (Bab 5), kemudian pendekatan bentang laut dalam konteks tata kelola terumbu karang (Bab 6), dilanjutkan dengan Bab 7 tentang pendekatan kawasan perlindungan laut dalam kerangka tata kelola terumbu karang. Dalam kerangka prinsip dan pendekatan ini, pada Bagian 2 juga dimuat bagaimana pendekatan mitigasi sangat penting dalam tata kelola terumbu karang (Bab),

kemudian dilanjutkan dengan Bab 9 yang menguraikan tentang pendekatan pengelolaan spesies langka dalam tata kelola terumbu karang. Bagian ini diakhiri dengan pendekatan regional dalam konteks tata kelola terumbu karang (Bab 10).

Bagian terakhir buku ini, yaitu Bagian 3 memuat metodologi dan dinamika implementasi tata kelola terumbu karang yang dimulai dengan uraian tentang peran forum multi-stakeholders dalam penguatan tata kelola terumbu karang (Bab 11), kemudian diikuti dengan identifikasi konflik dan resolusinya terkait dengan tata kelola terumbu karang (Bab 12). Bab 13 menyajikan uraian tentang potensi ekonomi terumbu karang, kemudian diikuti dengan uraian tentang analisis mata pencaharian yang terkait dengan masyarakat pengguna sumberdaya terumbu karang pada Bab 14, kemudian Bab 15 menyajikan aspek desentralisasi dalam tata kelola terumbu karang, Bab 16 tentang ketangguhan tata kelola kawasan terumbu dan diakhiri oleh Bab 17 tentang sintesis jejaring sains-kebijakan dalam tata kelola terumbu karang.

Kami menyadari bahwa buku ini hanya sebuah titik awal yang tidak boleh berhenti dari sebuah proses penguatan tata kelola terumbu karang secara praktis dan empiris di Indonesia. Oleh karena itu kami mengundang banyak pihak untuk terus menyempurnakan buku ini dalam edisi-edisi berikutnya. Tata kelola terumbu karang memerlukan sebuah pendekatan komunikasi yang efektif dan efisien dalam bentuk *science-policy networks*. Kami berharap melalui buku ini komunikasi yang efisien dan efektif antar pemangku kepentingan dalam tata kelola terumbu karang dapat terwujud.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu proses penyusunan buku ini dari mulai perencanaan awal sampai terbitnya buku ini, yaitu para kontributor penulisan buku ini, Sekretariat NCC-CTI Ibu Tri Iswari (Koordinator), Tomy Ganda Pratama, Rizki A. Yunanto, M. Faisal Reza, dan IPB Press yang berkenan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Jakarta, 1 Oktober 2013

Editors
Victor PH Nikijuluw
Luky Adrianto

Daftar Isi

Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan.....	v
Pegantar Editor.....	ix
Daftar Isi.....	xiii

BAGIAN 1 : TEORI, KONSEP DAN PARADIGMA TATA KELOLA TERUMBU KARANG

Bab 1. Etika Manajemen Terumbu Karang (<i>Coral Governance</i>)	
<i>Victor PH Nikijuluw</i>	3
- Pendahuluan	3
- Keharusan Pengelolaan	5
- Antroposentrisme dan Antropogenik.....	8
- Biosentrisme dan Konservasi	10
- Ekosentrisme dan Integritas Ekologi.....	13
- Etika <i>Coral Governance</i>	14
- Daftar Pustaka.....	17
 Bab 2. Konsep dan Aplikasi Teori Tata Kelola Sumberdaya (<i>Resources Governance</i>) dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang	
<i>Luky Adrianto</i>	21
- Pendahuluan.....	21
- Mengapa <i>Resources Governance</i> ?.....	22
- Konsep dan Definisi <i>Resources Governance</i>	27
- Perbedaan Antara <i>Governance</i> dan Manajemen	30
- Komponen dan Elemen <i>Resources Governance</i>	32
- Elemen Tata Kelola dalam Konteks Ekosistem Terumbu Karang di Indonesia	38
- Agenda Penelitian	58
- Daftar Pustaka	59

Bab 3. Bio-Ekologi Terumbu Karang Status dan Tantangan Pengelolaan	
<i>Dietriech G. Bengen</i>	61
- Pendahuluan.....	61
- Ragam Struktur dan Tipe Terumbu Karang.....	62
- Sebaran dan Kondisi Terumbu Karang.....	64
- Kontribusi Terumbu Karang pada Sumberdaya Ikan dan Jasa Kelautan.....	66
- Ancaman terhadap Kerusakan Terumbu Karang.....	68
- Perspektif Pengelolaan Terumbu Karang Secara Terpadu Berbasis Konservasi dalam Mendukung Keberlanjutan Sumberdaya Ikan dan Jasa Lingkungan.....	70
- Tantangan Pengelolaan Terumbu Karang ke Depan.....	72
- Daftar Pustaka.....	73
Bab 4. Manfaat dan Utilitas Ekosistem Terumbu Karang	
<i>M. Fedi A. Sondita</i>	75
- Pendahuluan.....	75
- Potensi Pemanfaatan yang Berkelanjutan.....	75
- Etika Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Karang.....	79
- Batas-batas Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Karang.....	82
- Dampak Pemanfaatan dan Pengelolaan.....	84
- Strategi Pengelolaan Secara Berkelanjutan.....	88
- Agenda Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan.....	92
- Keterkaitan <i>Coral Governance</i> dan Pelaku Pemanfaat.....	92
- Daftar Pustaka.....	95
BAGIAN 2 : PILAR-PILAR TATA KELOLA TERUMBU KARANG	
Bab 5. Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan Karang (EAFM)	
<i>Daniel Monintja</i>	99
- Konsep dan Terminologi EAFM.....	99
- Perbandingan Berbagai Pendekatan Pengelolaan.....	101
- EAFM sebagai Komponen <i>Coral Governance</i>	103
- Siklus Perencanaan Pengembangan dan Implementasi.....	104
- Teladan Kasus Implementasi.....	106
- Agenda Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan EAFM.....	109
- Ekosistem dan Penilaian Dampak Perikanan.....	109
- Daftar Pustaka.....	113

Bab 6. Pendekatan Bentang Laut (<i>Seascape</i>) dalam Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karang	
<i>Hendra Yusran Siry</i>	115
- Konsep dan Terminologi Bentang Laut (<i>Seascape</i>).....	116
- Bentang Laut sebagai Komponen <i>Coral Governance</i>	119
- Perbandingan Berbagai Pendekatan Kawasan dalam Pengelolaan	122
- Proses Membangun Bentang Laut	130
- Lokasi Bentang Laut.....	132
- Agenda Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan.....	138
- Daftar Pustaka.....	139
Bab 7. Pendekatan Kawasan Konservasi Perairan (<i>Marine Protected Area</i>) dalam Pengelolaan Ekosistem Karang	
<i>Pahala Nainggolan, Handoko Adi Susanto, Rony Megawanto</i>	157
- Pendahuluan	157
- Konsep Kawasan Konservasi Perairan	160
- Kategori Kawasan Konservasi Perairan.....	161
- Jejaring Kawasan Konservasi Perairan	164
- Sejarah dan Status Konservasi Perairan Indonesia	166
- Kebijakan dan Regulasi tentang Kawasan Konservasi Perairan	170
- Rencana Tata Ruang, RZWP3K, dan Kawasan Konservasi Perairan	171
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	173
- Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Konservasi Perairan.....	174
- Ekoregion Laut Indonesia.....	175
- Proses Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan	177
- Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.....	182
- Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	199
- Proses dan Indikator Evaluasi Dampak Kawasan Konservasi Perairan	209
- Studi Kasus	213
- Agenda Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	221
- Daftar Pustaka.....	221

Bab 8. Pendekatan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Kawasan Ekosistem Terumbu Karang	
<i>Alan F. Koropitan</i>	227
- Konsep, Terminologi, dan CCMA (<i>Climate Change Mitigation and Adaptation</i>).....	227
- CCMA sebagai Komponen <i>Coral Governance</i>	229
- Faktor-faktor Penentu Perubahan Iklim.....	230
- Indikator Perubahan Iklim di Tingkat Global.....	236
- Indikator Perubahan di Tingkat Nasional.....	239
- Agenda dan Strategi Mitigasi Perubahan Iklim.....	241
- Agenda dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim.....	242
- Agenda Penelitian dan Pengembangan.....	250
- Daftar Pustaka.....	251
Bab 9. Pendekatan Pengelolaan Spesies Langka, Terancam, dan Dilindungi	
<i>Imran Amin</i>	255
- Pendahuluan.....	255
- Pengelolaan Spesies Secara Global.....	255
- Sejarah Singkat IUCN Red List.....	261
- Kriteria IUCN.....	262
- Hasil Penilaian Red List 2012.....	264
- Pengelolaan Spesies Langka, Terancam Punah, dan Dilindungi di Indonesia.....	276
- Kebijakan Perlindungan Spesies dan Konservasi Ekosistem.....	277
- Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	280
Bab 10. Pendekatan <i>Inter-Governmental</i> dalam Manajemen Terumbu Karang	
<i>Victor PH Nikijuluw</i>	281
- Definisi dan Batasan.....	282
- Prinsip Non-Subsidiaritas.....	283
- Prinsip Konektivitas.....	286
- Pendekatan IG dalam Konteks CBM dan Ko-Manajemen.....	293
- Tujuan Manajemen dengan Pendekatan IG.....	294
- CTI-CFF sebagai Contoh.....	297
- Mengapa CTI-CFF.....	298
- Dampak dan Indikator.....	301
- Prinsip dan Program.....	304

- <i>Regional Fisheries Management Organization (RFMO)</i> sebagai Contoh.....	309
- Contoh Lain.....	313
- Agenda Penelitian.....	315
- Daftar Pustaka.....	316

BAGIAN 3 : DINAMIKA METODE DAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA TERUMBU KARANG

Bab 11. Peran Forum “ <i>Multi-Stakeholders</i> ” Identifikasi, Analisis Peran dan Partisipasi <i>Budy Wiryanan</i>	321
- Konsep dan Terminologi <i>Stakeholders</i>	321
- Partisipasi dan Model Partisipasi <i>Stakeholders</i>	322
- Analisis <i>Stakeholders</i>	324
- Peran dan Manfaat Forum <i>Multi-Stakeholders</i>	326
- Teladan dan Kasus Pelibatan <i>Stakeholders</i> dalam <i>Coral Governance</i>	327
- Daftar Pustaka.....	332
Bab 12. Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik <i>Rilus A. Kinseng</i>	335
- Pendahuluan.....	335
- Teori Konflik.....	337
- Pengertian Konflik.....	337
- Dua “Aliran” Teori Konflik.....	338
- Identifikasi Potensi Konflik.....	346
- Analisis Konflik.....	354
- Pengelolaan dan Resolusi Konflik.....	362
- Daftar Pustaka.....	369
Bab 13. Analisis Potensi Ekonomi Kawasan Terumbu Karang <i>Nimmi Zulbainarni</i>	373
- Konsep dan Terminologi Manfaat Ekonomi Kawasan Terumbu Karang.....	373
- Metode Analisis Ekonomi Kawasan Terumbu Karang.....	375
- Pentingnya Analisis Ekonomi dalam <i>Coral Governance</i>	388
- Contoh-contoh Analisis Ekonomi sebagai Basis Kebijakan ..	390
- Agenda Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan.....	400
- Daftar Pustaka.....	402

Bab 14. Analisis Mata-Pencarian yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Livelihood Analysis</i>) pada Kawasan Terumbu Karang	
<i>Siti Hajar Suryawati dan Agus Heri Purnomo</i>	405
- Konsep dan Terminologi <i>Sustainable Livelihood Analysis</i> (SLA).....	405
- Metode dan Proses SLA.....	411
- Aplikasi SLA di Wilayah CTI.....	418
- Daftar Pustaka.....	433
Bab 15. Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Konteks <i>Coral Governance</i>	
<i>Hendra Yusran Siry</i>	437
- Batasan dan Terminologi Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir.....	439
- Kedudukan Pengelolaan Pesisir dalam <i>Coral Governance</i>	445
- Analisis Aspek Legal Desentralisasi Wilayah Pesisir.....	448
- Permasalahan Desentralisasi Pengelolaan Pesisir.....	454
- Teladan dan Kasus.....	456
- Agenda Penelitian dan Pengkajian.....	466
- Daftar Pustaka.....	467
Bab 16. Ketangguhan Tata Kelola Kawasan Terumbu Karang Indonesia Melalui Pengelolaan Kolaboratif	
<i>Rili Djohani dan Johannes Subijanto</i>	473
- Ringkasan.....	473
- Latar Belakang.....	474
- Sejarah dan Konsep Pengelolaan Kolaboratif.....	476
- Definisi Pengelolaan Kolaboratif (Siapa dan Bagaimana).....	478
- Bentuk Kolaborasi yang Muncul.....	479
- Keadaan Lingkungan yang Mempengaruhi Proses Evolusi Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi.....	482
- Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.....	482
- Studi Kasus: Taman Nasional Komodo.....	486
- Ketangguhan Tata Kelola Terumbu Karang.....	488
- Daftar Pustaka.....	489

Bab 17. Pengembangan <i>Frontier Sciencies</i> dan Penguatan Jejaring Tata Kelola Terumbu Karang (<i>Coral Governance Networks</i>) dalam Kerangka Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia	
Luky Adrianto	491
- Pendahuluan.....	491
- Kebutuhan Kritis dari Riset Tata Kelola Terumbu Karang dalam Perspektif Akademisi dan Praktisi Pengelolaan.....	492
- Peran Jejaring Riset untuk Kolaborasi Sains-Kebijakan dalam Konteks Tata Kelola Terumbu Karang.....	495
- Penutup.....	497
- Daftar Pustaka.....	497
Editor	499
Kontributor	501

Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik

Rilus A. Kinseng

Pendahuluan

Sejauh ini fakta empiris menunjukkan bahwa konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan umat manusia dalam interaksinya satu dengan yang lain. Konflik dapat dijumpai pada setiap sistem sosial¹ dari tingkat yang terkecil seperti antar dua orang yang bersahabat atau berpacaran, antar anggota keluarga, antar anggota kelompok, hingga pada sistem sosial berskala makro internasional misalnya antar bangsa. Seperti kata Lulofs dan Cahn (2000) konflik merupakan “*a fact of life*”. Sosiolog Dahrendorf mengatakan, “*Every society displays at every point dissensus and conflict; social conflict is ubiquitous*” (Dahrendorf, 1963:162). Senada dengan itu, Sosiolog Georg Simmel mengatakan bahwa: “*An absolutely centripetal and harmonious group, a pure ‘unification’, not only is empirically unreal, it could show no real life process*” (Simmel, 1966:15). Selanjutnya dia katakan, “*Just as the universe needs ‘love and hate’, that is, attractive and repulsive forces, in order to have any form at all, so society, too, in order to attain a determinate shape, needs some quantitative ratio of harmony and disharmony, of association and competition, of favorable and unfavorable tendencies*”. Demikian juga bagi sosiolog Karl Marx. Seperti dikatakan oleh Vago, “*For Marx, conflict is a normal condition of social life whose nature and variation are some of the most important things to be described and analyzed by social science*” (Vago, 1989:37). Pernyataan dari Karl Marx dan Frederick Engels yang sangat terkenal terdapat dalam kalimat awal di buku mereka yang juga sangat terkenal yaitu *The Communist Manifesto* adalah:

¹ Menurut Parsons, sebuah sistem sosial itu terdiri dari pluralitas individual aktor yang berinteraksi satu sama lain. Pluralitas itu sendiri bisa berarti dua atau lebih, sedangkan aktor bisa berupa orang ataupun kolektivitas (Wallace and Wolf, 2006: 27).

“The history of all hiterto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeymen, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant oposition to one another, carried on an uniterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary reconstitution of sociaety at large, or in the common ruin of the contending classes” (Marx and Engels, 1948/1991).

Pernyataan ini menekankan keberadaan konflik berupa perjuangan kelas dalam sejarah kehidupan masyarakat. Mereka percaya bahwa konflik itu terus ada sebelum terciptanya sistem komunis, kadang muncul ke permukaan, kadang tersembunyi.

Belakangan ini masalah yang berkaitan dengan sumberdaya alam semakin sering menjadi isu utama dalam konflik sosial², seperti konflik antar nelayan, konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang maupun kelapa sawit, konflik antara masyarakat lokal dengan otoritas pengelola kawasan konservasi, dsb. Beberapa tahun yang lalu MacNeill *et al* sudah memperkirakan bahwa konflik mengenai sumberdaya dan lingkungan itu akan semakin parah di masa yang akan datang. Mereka katakan *“Conflict based on climate change, environmental disruption, and water and other resource scarcities could well become endemic in the world of the future”* (MacNeill *et al.*, 1991:20). Yang lebih berbahaya, Homer-Dixon memperkirakan bahwa ke depan bukan sekedar konflik saja yang meningkat sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya alam, melainkan konflik kekerasan (*violent conflict*). Homer-Dixon (1999:4) mengatakan: *“...in coming decades the world will probably see a steady increase in the incidence of violent conflict that is caused, at least in part, by environmental scarcity”*. Sejalan dengan itu, saya memprediksi bahwa ke depan konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan, termasuk terumbu karang, kemungkinan besar akan semakin meningkat; dan konflik tersebut cenderung akan semakin bersifat konflik kekerasan jika tidak dibangun sistem pengelolaan konflik yang efektif.

Untuk membangun sistem pengelolaan konflik yang efektif, tentunya kita perlu memahami secara mendalam berbagai aspek dari konflik sosial itu sendiri. Bab ini diharapkan akan memberi kontribusi bagi upaya memahami

2 Konflik sosial yang isu utamanya adalah masalah sumberdaya alam seringkali dikenal dengan istilah “konflik sumberdaya alam”.

konflik sosial, sekalipun sifatnya lebih sebagai “pengantar”. Uraian ini akan diawali dengan pembahasa teori konflik yang lebih umum (*grand theory*), kemudian diikuti dengan pembahasan isu-isu yang lebih bersifat aplikatif.

Teori Konflik

Teori konflik mempunyai pandangan tersendiri tentang masyarakat. Dalam teori ini, masyarakat dipandang sebagai arena tempat orang, baik secara individu maupun kelompok, memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Seperti dikatakan oleh Steven Vago, “*Conflict theory assumes that social behavior can best be understood in terms of tension and conflict between groups and individuals. It suggests that society is an arena in which struggles over scarce commodities take place*” (Vago, 1989: 36).

Pandangan ini berbeda sekali dengan gambaran masyarakat yang ditampilkan dan ditekankan oleh teori fungsionalisme. Dalam teori fungsionalisme, masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian (subsistem) yang saling terkait satu dengan yang lain. Teori fungsionalisme juga menekankan kondisi masyarakat yang “normal” atau “equilibrium”; jika ada gangguan pada suatu bagian, maka keseluruhan sistem sosial akan menyesuaikan diri sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu kondisi keseimbangan (normal) yang baru. Seperti kata Wallace dan Wolf, “*Where functionalists see interdependence and unity in society, conflict theorists see an arena in which groups fight for power, and the control of conflict simply means that one group is able, temporarily, to suppress its rivals*” (Wallace and Wolf, 2006:68)

Pengertian Konflik

Para ilmuwan sosial telah membuat berbagai definisi konflik. Sebagai contoh, Lewis Coser mengatakan bahwa “*Social conflict...to mean a struggle over values and claims to scarce status, power and resources in which the aims of the proponents are to neutralize, injure or eliminate their rivals*” (Coser, 1964: 8). Sementara itu, Broom dan Selznick menjelaskan bahwa “*When the clash of interests is so keen that groups not merely compete for the same scarce goals but seek to injure or even destroy each other, there is conflict...*” (Broom and Selznick, 1973:48).

Selanjutnya, menurut Boulding, konflik "*is a situation of competition in which the parties are aware of the incompatibility of potential future positions and in which each party wishes to occupy a position that is incompatible with the wishes of the other*" (Boulding dalam Oberschall, 1978:291), sedangkan Fisher dkk mengatakan bahwa "konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, dkk, 2001). Selanjutnya, Kriesberg mengatakan bahwa "*a social conflict arises when two or more persons or groups manifest the belief that they have incompatible objectives*" (Kriesberg, 2003:2). Sementara itu, Charon lebih menekankan pada perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Dia mengatakan bahwa "*Conflict means the struggle by actors over something value*" (Charon, 2001:79). Sebagai ahli psikologi sosial, Pruitt dan Rubin menekankan aspek persepsi dalam definisi mereka. Mereka mengatakan "Bagi kami, konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan" (Pruitt dan Rubin, 2004).

Menurut saya, konflik adalah relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing. Jika pertentangan atau perselisihan dan kemarahan itu terbuka, maka ia merupakan suatu konflik terbuka, sementara itu, jika pertentangan atau perselisihan dan kemarahan itu bersifat tersembunyi atau tertutup maka ia masuk dalam kategori konflik laten. Selanjutnya, selain adanya rasa marah, relasi sosial ini umumnya juga ditandai oleh rasa tidak senang bahkan benci satu terhadap yang lain.

Dua "Aliran" Teori Konflik

Wallace and Wolf (2006) membagi teori konflik menjadi dua kelompok besar, yakni pertama, "teori konflik dan kritik terhadap masyarakat" dan yang kedua, "teori konflik dan sosiologi analitik". Tokoh-tokoh pada kelompok pertama meliputi Karl Marx dan para sosiolog Marxist modern, para pemikir mazhab Frankfurt, C. Wright Mills, dan Pierre Bourdieu. Sementara itu, kelompok yang kedua tokoh-tokohnya mencakup Ralf Dahrendorf, Lewis Coser, dan Randall Collins. Kelompok pertama sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, sedangkan kelompok yang kedua, meski juga dipengaruhi oleh Marx,

tetapi pengaruh Max Weber lebih dominan. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas teori konflik Marx dan Dahrendorf sebagai contoh dari masing-masing kelompok tersebut.

Dapat dikatakan bahwa teori konflik itu tidak dapat dipisahkan dari Karl Marx (1818-1883). Seperti dikatakan oleh Wallace and Wolf, "*Conflict theory in sociology is the creation of Karl Marx. Indeed, Marxism and conflict theory are sometimes discussed as though the two were synonymous*" (Wallace and Wolf, 2006:70). Seperti terlihat dalam kutipan dari *The Communist Manifesto* di atas, Marx menekankan pentingnya konflik kelas. Oleh sebab itu, untuk memahami teori konflik Marx, haruslah dipahami pandangan Marx mengenai kelas sosial itu sendiri.

Sebenarnya Marx sendiri tidak pernah membuat definisi kelas sosial itu secara tegas (Hamilton and Hirszowicz, 1987:5). Namun demikian, umumnya sudah dipahami bahwa yang dimaksud kelas sosial menurut Marx adalah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan hubungan orang-orang dengan alat produksi atau berdasarkan kepemilikan alat produksi. Seperti kata Dahrendorf, "*For Marx, the determinant of social classes was effective private property in the means of production*" (Dahrendorf, 1963:136). Senada dengan itu, Hamilton dan Hirszowicz mengatakan bahwa: "*For Marx, class is fundamentally a question of relationship to the means of production and the place a person occupies in the social organization of production*" (Hamilton and Hirszowicz, 1987:5). Demikian pula Wallace and Wolf menjelaskan bahwa bagi Marx "*A class is made up of people who are alike in their relationship to property: they have none, or they have the same type*" (Wallace and Wolf, 2006:82). Dengan demikian, maka pada dasarnya ada dua kelas utama yang sangat penting dalam pandangan Marx, yakni kelas yang memiliki alat produksi dan kelas yang tidak memiliki alat produksi. Pada sistem kapitalis, kelas pemilik alat produksi tersebut adalah kelas kapitalis, sedangkan kelas yang tidak memiliki alat produksi adalah kelas buruh (proletar).

Dalam pandangan Marx, kelas sosial yang berbeda itu secara intrinsik memiliki kepentingan yang bertentangan (antagonis). Seperti dikatakan Wallace and Wolf, "*Marxist theory argues that different classes inevitably have incompatible interests because under systems of property ownership if one class makes economic gains, it must be at the expense of another*" (Wallace and Wolf, 2006:83). Hal inilah yang menjadi sumber terjadinya konflik kelas. Namun demikian, Marx membedakan dua jenis kelas sosial. Pertama, kelas sosial secara "objektif",

yakni kelas sebagai kumpulan orang berdasarkan hubungannya terhadap alat produksi. Marx mengatakan: "*In so far as millions of families live under economic conditions which separate their way of life, their interest, and their education from those of other classes and oppose them to these, they constitute a class*" (dikutip oleh Dahrendorf, 1963:13). Kelas sosial jenis ini dikenal dengan berbagai sebutan seperti "*class position*" atau "*class situation*" atau "*class in itself*". Erik Olin Wright menyebutnya dengan istilah *class structure* (Wright, 1987:9).

Kelas sosial jenis yang pertama ini sebenarnya baru merupakan potensi bagi terjadinya konflik kelas. Seperti dijelaskan oleh Dahrendorf, "*However, these economic conditions of existence are not in themselves sufficient for the formation of classes*" (Dahrendorf, 1963:13). Marx sendiri bahkan mengatakan bahwa "*...in so far the identity of their interests does not produce a community, national association, and political organization-they do not constitute a class*" (dikutip oleh Dahrendorf, 1963:13).

Kedua adalah jenis kelas sosial yang telah memiliki kesadaran kelas atau *class consciousness*. Kelas ini sangat penting dan seringkali dianggap oleh kaum Marxist sebagai "kelas sosial yang sesungguhnya" atau yang disebut Stavenhagen sebagai "*class in the truest sense of the word*" (Stavenhagen, 1975:31). Kelas sosial jenis ini disebut "*class for itself*". Sebenarnya, kelas sosial jenis yang kedua inilah yang dimaksud oleh Marx ketika dia berkata bahwa: "*The separate individuals form a class only in so far as they have to carry on a common battle against another class; otherwise they are on hostile terms with each other as competitors*" (dikutip oleh Coser, 1977:48). Stavenhagen menjelaskan kedua jenis atau fase kelas ini dengan baik, sebagai berikut:

"There are, then, two consecutive phases in the development of class. In the first phase, a class constitute a class only with respect to other classes, as a function of its position in the socio-economic structure, and the specific relations that grow out of this position. In the second phase, a class has gained consciousness of itself, its interests, and of its historical 'mission', and constitutes a class 'in the truest sense of the word'. It is a political action group..." (Stavenhagen, 1975:31).

Jonathan Turner (1998) telah meringkas teori konflik Marx pada level yang abstrak dan disajikan dalam bentuk proposisi. Proposisi tersebut dimulai dengan kondisi yang memicu munculnya konflik kepentingan (proposisi I) hingga perubahan struktural akibat dari konflik kelas (proposisi VII). Proposisi yang dikemukakan oleh Turner ini disajikan pada Tabel 1.

Berbeda dengan Marx, Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa kepemilikan alat produksi hanya merupakan salah satu faktor yang menjadi sumber konflik. Menurut Dahrendorf, sumber konflik yang sesungguhnya adalah kekuasaan atau otoritas. Kepemilikan alat produksi merupakan salah satu bentuk dari faktor determinan kelas dan konflik yang lebih umum, yakni otoritas. "*Authority is the more general social relation*", kata Dahrendorf (1963:137). Selanjutnya dikatakan bahwa "*The authority structure of entire societies as well as particular institutional orders within societies (such as industry)...is the structural determinant of class formation and class conflict*" (Dahrendorf, 1963:136). Dahrendorf berpandangan bahwa ada kecenderungan yang melekat pada masyarakat untuk berkonflik; karena mereka yang memiliki kekuasaan akan mengejar kepentingannya, sementara yang tidak memiliki kekuasaan juga mengejar kepentingannya. Padahal, kepentingan kedua pihak ini bertentangan. Itulah yang menjadi sumber konflik. Oleh sebab itu, bagi Dahrendorf "*Power is a lasting source of friction*" (Wallace and Wolf, 2006:122). Meskipun dasar kelasnya berbeda, namun model kelas sosial Dahrendorf ini juga bersifat "bipolar" atau "dua kutub" seperti model Marx, yakni kelas yang memiliki otoritas dan kelas yang tidak memiliki otoritas. Seperti dia jelaskan, "*...classes are social conflict groups the determinant... of which can be found in the participation in or exclusion from the exercise of authority within any imperatively coordinated association*" (Dahrendorf, 1963:138).

Jonathan Turner (1998) telah meringkas teori konflik Marx pada level yang abstrak dan disajikan dalam bentuk proposisi. Proposisi tersebut dimulai dengan kondisi yang memicu munculnya konflik kepentingan (proposisi I) hingga perubahan struktural akibat dari konflik kelas (proposisi VII). Proposisi yang dikemukakan oleh Turner ini disajikan pada Tabel 1.

Berbeda dengan Marx, Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa kepemilikan alat produksi hanya merupakan salah satu faktor yang menjadi sumber konflik. Menurut Dahrendorf, sumber konflik yang sesungguhnya adalah kekuasaan atau otoritas. Kepemilikan alat produksi merupakan salah satu bentuk dari faktor determinan kelas dan konflik yang lebih umum, yakni otoritas. "*Authority is the more general social relation*", kata Dahrendorf (1963:137). Selanjutnya dikatakan bahwa "*The authority structure of entire societies as well as particular institutional orders within societies (such as industry)...is the structural determinant of class formation and class conflict*" (Dahrendorf, 1963:136). Dahrendorf berpandangan bahwa ada kecenderungan yang melekat pada masyarakat untuk berkonflik; karena mereka yang memiliki kekuasaan akan mengejar kepentingannya, sementara yang tidak memiliki kekuasaan juga mengejar kepentingannya. Padahal, kepentingan kedua pihak ini bertentangan. Itulah yang menjadi sumber konflik. Oleh sebab itu, bagi Dahrendorf "*Power is a lasting source of friction*" (Wallace and Wolf, 2006:122). Meskipun dasar kelasnya berbeda, namun model kelas sosial Dahrendorf ini juga bersifat "bipolar" atau "dua kutub" seperti model Marx, yakni kelas yang memiliki otoritas dan kelas yang tidak memiliki otoritas. Seperti dia jelaskan, "*...classes are social conflict groups the determinant... of which can be found in the participation in or exclusion from the exercise of authority within any imperatively coordinated association*" (Dahrendorf, 1963:138).

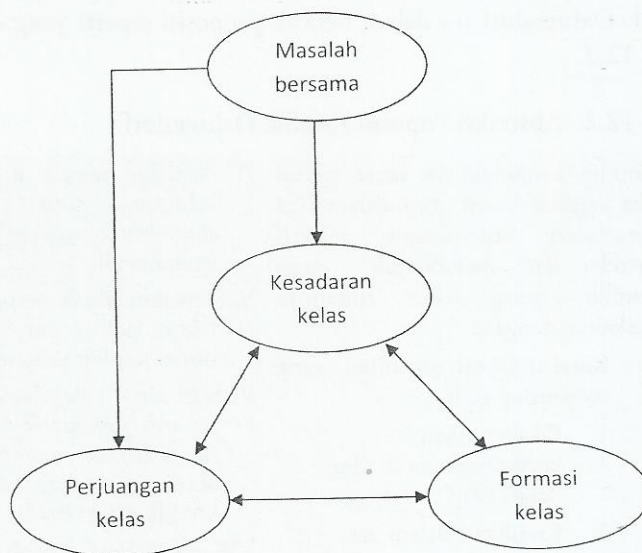
Seperti terlihat pada kutipan di atas, bagi Dahrendorf konflik kelas itu terjadi dalam organisasi sosial yang disebut *imperatively coordinated association (ICA)*. Dan seperti dijelaskan oleh Turner (1998), unit sosial apapun, mulai dari kelompok kecil hingga masyarakat secara keseluruhan dapat dianggap sebagai *ICA* sepanjang di dalamnya ada peranan yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang berbeda. Jonathan Turner (1998) membuat abstraksi dari teori konflik Dahrendorf ini dalam bentuk proposisi seperti yang disajikan pada Tabel 12.2.

Tabel 12.2. Abstraksi Poposisi Konflik Dahrendorf

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I. Konflik kemungkinan besar terjadi jika anggota 'kuasi grup' dalam <i>ICA</i> menyadari kepentingan objektif mereka dan membentuk grup konflik, yang pada gilirannya berkaitan dengan:</p> <p>A. Kondisi teknis organisasi, yang tergantung pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kepemimpinan di dlm 'kuasi grup' 2. Kodifikasi sistem ide <p>B. Kondisi politik, tergantung apakah kelompok dominan mentolerir pengorganisasian kelompok yang berlawanan kepentingannya</p> <p>C. Kondisi sosial, yang tergantung pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan bagi anggota kuasi grup untuk berkomunikasi 2. Kesempatan untuk merekrut anggota <p>II. Semakin tidak terpenuhi kondisi teknis, politis, dan sosial tersebut, semakin intens konflik yang terjadi.</p> <p>III. Semakin terkait distribusi otoritas dan <i>rewards</i> satu sama lain (<i>superimposed</i>), semakin intens konflik yang terjadi.</p> | <p>IV. Semakin rendah mobilitas antara kelompok super ordinat dan subordinat, semakin intens konflik yang terjadi.</p> <p>V. Semakin tidak terpenuhi kondisi teknis, politis, dan sosial, semakin brutal konflik yang terjadi.</p> <p>VI. Semakin deprivasi distribusi <i>rewards</i> kelompok yang tertindas itu distribusi <i>rewards</i> bergeser dari absolut ke relatif, semakin brutal konflik yang terjadi.</p> <p>VII. Semakin rendah kemampuan kelompok yang bertikai untuk membangun kesepakatan aturan main, semakin brutal konflik yang terjadi.</p> <p>VIII. Semakin intens konflik, semakin besar tingkat perubahan struktural dan reorganisasi yang terjadi.</p> <p>IX. Semakin brutal konflik, semakin tinggi kecepatan perubahan struktural dan reorganisasi yang terjadi.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Turner, 1998

Saya menemukan bahwa faktor penting yang mendorong tumbuhnya kesadaran kelas maupun perjuangan kelas adalah adanya masalah atau “musuh bersama”. Selanjutnya ada interaksi timbal balik atau dialektika yang terus terjadi antara kesadaran kelas, perjuangan kelas dan “formasi kelas”. Secara skematis proses interaksi ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 12.1. Dialektika antara masalah bersama, kesadaran kelas, perjuangan kelas dan formasi kelas.

Selanjutnya akan dibahas secara ringkas mengenai fungsi positif dari konflik sosial. Ini penting, mengingat banyak orang melihat konflik hanya dari sisi negatifnya saja. Sebenarnya sejak semula banyak ahli konflik yang telah menyadari bahwa sebenarnya konflik itu tidak hanya mempunyai dampak negatif, tetapi juga dampak positif, sehingga dikenal istilah konflik destruktif dan konflik konstruktif. Pernyataan Simmel yang dikutip di bagian awal tulisan ini merefleksikan hal tersebut. Salah seorang tokoh teori konflik, Lewis Coser misalnya, membahas fungsi konflik sosial ini secara panjang lebar dalam bukunya *"The Functions of Social Conflict"* (Coser, 1964). Demikian juga tokoh lainnya, Louis Kriesberg, membahas tentang "konstruktif konflik" secara panjang lebar dalam bukunya *"Constructive Conflicts"* (Kriesberg, 2003). Jonathan Turner (1998) telah meringkas fungsi konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis Coser tersebut seperti pada Tabel 12.3. berikut

Tabel 12.3. Proposisi Coser mengenai Fungsi Konflik untuk Masing-masing Kelompok yang Berkonflik

- I. Semakin brutal atau intens suatu konflik, semakin ia menyebabkan:
 - A. Jelasnya batas kelompok,
 - B. Sentralisasi struktur pengambilan keputusan,
 - C. Solidaritas anggota,
 - D. Penekanan terhadap pembangkang dan yang menyimpang, serta menguatkan konformitas terhadap nilai dan norma.
- II. Semakin suatu konflik antar pihak mendorong pusat kekuasaan memaksakan konformitas dalam kelompok, semakin besar akumulasi permusuhan, dan semakin besar kemungkinan konflik internal muncul ke permukaan dalam jangka panjang.

Sumber: Turner, 1998

Tabel 12.4. Proposisi Coser mengenai Fungsi Konflik untuk Sistem Sosial Secara Keseluruhan

- I. Semakin terdiferensiasi dan saling tergantung secara fungsional satu sama lain bagian-bagian dalam suatu sistem sosial, semakin besar kemungkinan konflik itu sering terjadi tetapi dengan intensitas dan kebrutalan yang rendah.
- II. Semakin rendah intensitas dan kebrutalan konflik, semakin besar kemungkinan konflik menyebabkan:
 - A. Peningkatan inovasi dan kreativitas unit-unit suatu sistem sosial,
 - B. Pelepasan permusuhan sebelum ia mempolarisasi unit-unit suatu sistem sosial,
 - C. Mendorong tumbuhnya aturan normatif hubungan konflik,
 - D. Peningkatan kesadaran akan isu-isu realistik,
 - E. Peningkatan jumlah koalisi asosiatif antara unit-unit sosial.
- III. Semakin suatu itu konflik mendorong butir II-A sampai II-E tersebut, maka semakin besar tingkat integrasi sosial internal sistem secara keseluruhan dan semakin besar kapasitasnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal.

Sumber: Turner, 1998

Sejalan dengan itu, Engel and Korf (2005) mengatakan bahwa konflik itu bisa mempunyai *outcomes* yang konstruktif dan positif, tergantung bagaimana orang menanganinya. Menurut mereka, konflik dapat memperjelas kebijakan, institusi dan proses yang mengatur akses terhadap sumberdaya alam. Sejalan dengan pemikiran Marx, Dahrendorf dan yang lain, Engel dan Korf juga

mengatakan bahwa konflik sosial merupakan kekuatan yang mendorong perubahan sosial, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam. Mereka mengatakan: “*Conflict can be a creative, constructive force for improving natural resource management if people learn the skills to analyse and manage it in a constructive and participatory manner*” (Engel and Korf, 2005:36).

Identifikasi Potensi Konflik

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, konflik merupakan bagian dari kehidupan atau interaksi sosial. Oleh sebab itu, maka diperlukan kemampuan untuk “hidup berdamai dengan konflik”, artinya kita harus mampu hidup “bersama” atau “berdampingan” dengan konflik. Yang perlu dilakukan adalah mengelola konflik dengan baik, agar ia tidak bersifat destruktif. Dalam rangka mengelola konflik ini, salah satu yang sangat penting untuk dilakukan adalah mengidentifikasi potensi konflik yang ada. Dalam tulisan ini, istilah “potensi konflik” sama artinya dengan konflik laten. Ini sejalan dengan Kriesberg (2003:3) yang menggunakan istilah “*objective, latent, underlying, or potential conflicts*” untuk relasi tertentu yang belum menjadi konflik manifes. Demikian juga Engel and Korf (2005:38) mengatakan bahwa: “*When conflict is not open but is a potential threat, it is described as being latent*”. Dalam upaya mengidentifikasi atau mendeteksi potensi konflik atau konflik laten ini, pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kategorisasi konflik.

Kategorisasi Konflik

Kategorisasi konflik yang dimaksud di sini adalah penggolongan konflik ke dalam berbagai tipe atau jenis konflik. Kita seringkali mendengar berbagai sebutan tentang konflik, seperti konflik laten, konflik etnis, konflik agama, konflik komunal, konflik horizontal, konflik destruktif, konflik budaya, dan sebagainya. Jenis atau tipe-tipe konflik ini tentunya dibuat berdasarkan dasar tertentu, yang bisa sangat berbeda satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa dasar penggolongan atau kategorisasi konflik, yang menghasilkan berbagai jenis konflik yang sering kita dengar atau baca tersebut.

1. Pihak atau “aktor” yang berkonflik.

Penggolongan atau kategorisasi konflik dapat dilakukan berdasarkan pihak atau aktor yang berkonflik. Istilah konflik etnis dan konflik agama, misalnya, bisa saja merujuk pada jenis konflik berdasarkan pihak

yang berkonflik ini. Jika ini yang dimaksud, maka konflik etnis merujuk pada konflik yang terjadi antara dua atau lebih etnis yang berbeda (misalnya antara etnis X dan etnis Y); sedangkan konflik agama adalah konflik yang terjadi antara pemeluk dua atau lebih agama yang berbeda (misalnya antara pemeluk Agama X dan Agama Y). Konflik komunal juga merujuk pada pihak yang berkonflik, biasanya antara satu kelompok atau komunitas tertentu dengan kelompok atau komunitas yang lain.

2. Isu atau “substansi” konflik.

Konflik dapat pula dikategorisasi berdasarkan isu atau “substansi” masalah yang memicu konflik tersebut. Penyebutan “konflik budaya”, misalnya, cenderung merujuk pada konflik yang disebabkan persoalan budaya. Demikian juga dengan istilah konflik sumberdaya dan konflik ekonomi. Di kalangan nelayan, istilah konflik penguasaan wilayah tangkap (*fishing ground*) merupakan tipologi konflik yang dibuat berdasarkan isu atau substansi konflik, sedangkan istilah konflik teknologi atau “perang alat tangkap” (“*gear wars*”) bisa sekaligus merujuk pada isu dan pihak yang berkonflik.

3. Posisi pihak yang berkonflik.

Istilah konflik vertikal dan horizontal merupakan penggolongan konflik berdasarkan posisi para pihak yang berkonflik. Konflik vertikal merujuk pada jenis konflik yang terjadi antara pihak “bawah” misalnya masyarakat atau para buruh, dengan pihak “atas” misalnya pemerintah atau perusahaan besar. Sementara itu, konflik horizontal merujuk pada konflik antara pihak yang posisinya sama, misalnya antara sesama warga masyarakat atau sesama buruh.

4. Akibat atau dampak konflik.

Konflik juga bisa digolongkan berdasarkan akibat atau dampaknya. Berdasarkan akibat atau dampaknya, ada dua jenis konflik yaitu konflik konstruktif dan destruktif. Memang sebenarnya tidak mudah mendefinisikan mana konflik yang konstruktif dan mana yang destruktif. Namun dapat dikatakan bahwa secara konseptual, konflik konstruktif adalah konflik yang “berfungsi positif” seperti kata Lewis Coser dan lain-lain. Sebaliknya, konflik destruktif adalah konflik yang mengakibatkan kerusakan bahkan kehancuran, baik harta benda maupun jiwa manusia.

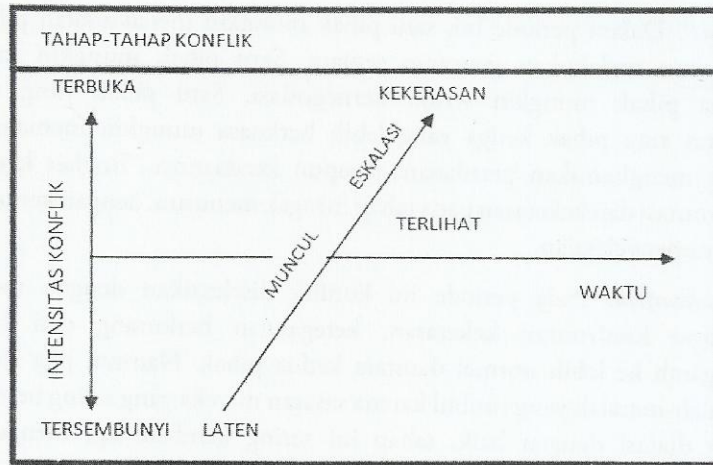
5. Tahapan konflik.

Kita sering juga mendengar atau membaca istilah konflik laten dan konflik terbuka. Kategorisasi konflik ini sesungguhnya dibuat berdasarkan tahapan konflik, ditinjau dari tingkat keterbukaannya. Konflik laten adalah konflik yang masih tertutup atau tersembunyi. Adanya potensi konflik atau kondisi yang dapat memicu konflik juga merupakan bentuk konflik laten. Engel dan Korf (2005:38) mengatakan bahwa: "*When conflict is not open but is a potential threat, it is described as being latent; there may be smoke, but there is no visible fire. Latent conflict refers to social tensions, differences and disagreements that are hidden or undeveloped*". Sementara itu, konflik terbuka adalah konflik yang sudah terjadi secara terbuka.

Dalam mengidentifikasi potensi konflik, dasar kategorisasi konflik yang digunakan perlu dipahami dengan baik, khususnya perbedaan antara kategori berdasarkan pihak atau aktor yang berkonflik dengan isu atau substansi yang menjadi masalah konflik tersebut. Pemahaman ini sangat berkaitan dengan strategi pengelolaan konflik yang akan dilakukan nantinya. Sebagai contoh, penyebutan "konflik agama" sebenarnya bisa merujuk pada dua jenis konflik yang sangat berbeda. Pertama, ia bisa merujuk pada kategorisasi konflik berdasarkan pihak atau aktor yang berkonflik. Jika ini yang dimaksud, maka istilah konflik agama adalah konflik yang terjadi antara pemeluk agama yang berbeda; sedangkan isu atau substansi dari konflik itu bisa saja bukan masalah agama, tetapi masalah ekonomi, politik, dsb. Kedua, istilah konflik agama bisa juga dibuat berdasarkan isu atau substansi dari konflik tersebut. Dalam hal ini istilah "konflik agama" merujuk pada konflik yang isu atau substansi pemicu konfliknya berkaitan dengan ajaran agama. Kedua jenis "konflik agama" ini sangat berbeda, dan pengelolaan serta penyelesaiannya tentunya berbeda pula.

Tahapan Konflik

Umumnya konflik itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang kadangkala cukup panjang. Beberapa ahli telah membuat tahapan-tahapan konflik. Engel and Korf (2005) menggambarkan tahapan konflik mulai dari laten, muncul ke permukaan hingga kekerasan (*violent*) seperti disajikan pada Gambar 2.



Gambar 12.2. Tahap-tahap Konflik.

Sumber: Engel and Korf, 2005

Sementara itu, Fisher dkk (2001) membagi tahapan konflik menjadi lima tahap, yakni: prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik.

Prakonflik merupakan periode dimana terdapat ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga akan menimbulkan konflik. Pada tahap ini mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. Fase ini nampaknya sama dengan fase konflik laten pada tahapan yang dibuat oleh Engel and Korf.

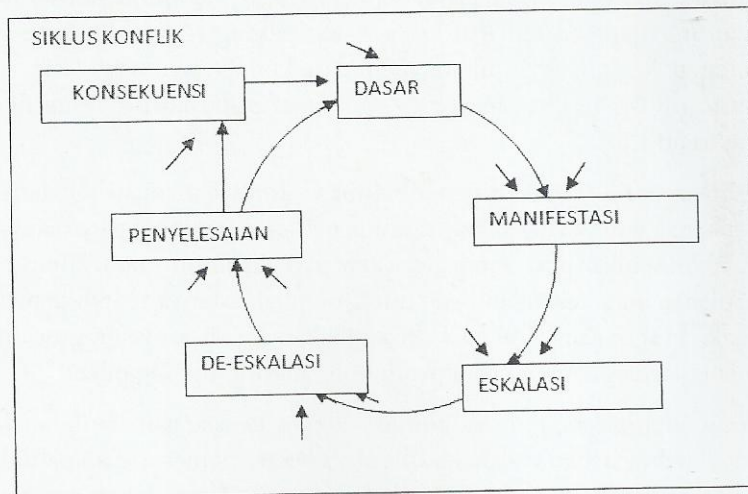
Konfrontasi merupakan periode dimana konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua pihak. Hubungan diantara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi diantara para pendukung masing-masing pihak.

Krisis merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.

Akibat³. Dalam periode ini, satu pihak mungkin menaklukkan pihak yang lain, atau melakukan gencatan senjata. Satu pihak mungkin menyerah. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi. Satu pihak yang memiliki otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

Pascakonflik. Pada periode ini konflik diselesaikan dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

Pandangan mereka ini menunjukkan bahwa konflik itu bisa berupa siklus, dimana penyelesaian konflik pada tahap pascakonflik sebenarnya bisa kembali lagi menjadi tahap prakonflik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Louis Kriesberg (2003), yang mengatakan bahwa tahap-tahap konflik itu merupakan sebuah siklus. Menurut dia, penyelesaian suatu konflik dapat menjadi basis (dasar) bagi konflik berikutnya, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 12.3. Siklus Konflik

Sumber: Kriesberg, 2003.

³ Sebagai catatan, saya merasa penggunaan istilah "akibat" sebagai tahapan konflik tidak tepat. Akibat konflik lebih merujuk pada dampak dari konflik itu atau konsekuensi konflik. Istilah Kriesberg, bisa positif (konflik konstruktif) bisa pula negatif (konflik destruktif).

Menurut Engel and Korf (2005), konflik dapat muncul secara gradual, atau berkembang secara cepat sebagai respon terhadap beberapa kejadian yang penting. Ketika perbedaan meningkat dan semakin intensif, konflik laten akan berubah menjadi *manifestes*. Selanjutnya, konflik manifestes ini mungkin akan berkembang dan mengalami eskalasi sehingga mencapai tahap konflik kekerasan.

Menurut Engel and Korf (2005), konflik dapat menjadi keras (brutal) ketika:

- Tidak ada saluran yang memadai untuk dialog dan ketidak-sepakatan,
- Suara-suara yang berbeda dan keluhan-keluhan yang tertanam mendalam tidak bisa didengar,
- Ada ketidakstabilan, ketidakadilan dan ketakutan dalam masyarakat atau komunitas yang lebih luas,
- Orang beranggapan ada insentif atau keuntungan dari kekerasan.

Menurut saya, konflik kekerasan seringkali terjadi karena berbagai upaya damai (“jalan damai”) mengalami kebuntuan atau tidak menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima terutama oleh pihak yang merasa dirugikan. Sebagai contoh, konflik kekerasan antara nelayan “modern” dengan nelayan “tradisional” di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang saya teliti terjadi setelah berbagai upaya penyelesaian damai mengalami kebuntuan (lihat Kinseng, 2011). Hal ini sejalan dengan pendapat White (1989) yang mengatakan bahwa dukungan dan keterlibatan seseorang dalam kekerasan politik merupakan hasil dari keputusan yang secara sadar dibuat oleh orang tersebut, ketika dia merasa bahwa protes damai itu sia-sia belaka (White, 1989:1297).

Menurut Engel and Korf (2005) idealnya konflik harus dikelola dengan tepat ketika masih pada tahap laten, sebelum ia pecah ke permukaan dan mengalami eskalasi menjadi konflik kekerasan. Menurut mereka, ketika konflik mencapai tahap manifestes, ia bisa tertahan pada kondisi “tidak ada yang menang atau kalah” (*stalemate*) dimana masing-masing pihak yang terlibat menolak untuk mengubah posisi mereka, atau konflik bisa juga berkembang menjadi tidak terkontrol melalui tindakan-tindakan kekerasan.

Mendeteksi Konflik Laten Secara Cepat

Untuk bisa mengelola konflik pada tahap laten ini, tentu saja diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi potensi konflik atau konflik laten tersebut. Jika merujuk pada teori konflik Marxian, maka adanya

“kelas sosial” merupakan potensi konflik yang besar. Dasar kelas sosial ini adalah “relasi terhadap alat produksi” atau “*relation to the means of production*” yang menghasilkan dua kelas utama, yakni kelas pemilik dan kelas buruh. Selain itu, kaum Neo-Marxis seperti Erik O. Wright menjelaskan bahwa kelas sosial juga bisa dibuat berdasarkan “penguasaan aset produksi” dan jumlah tenaga kerja sehingga menghasilkan empat kelas sosial yakni kapitalis, *small employers*, *petty bourgeoisie*, dan *wage-earner* (Wright, 1987). Mengadopsi pemikiran kaum Neo-Marxis ini, saya membagi nelayan di Balikpapan menjadi empat kelas sosial, yakni nelayan kapitalis, nelayan menengah, nelayan kecil, dan buruh nelayan (Kinseng, 2011). Di kalangan para nelayan sendiri, penggolongan nelayan ke dalam kelas “nelayan kecil” atau “nelayan tradisional” dan “nelayan besar” atau “nelayan modern” merupakan hal yang sudah dikenal luas. Dan perlu diingat, di Indonesia konflik yang terjadi antara kelas “nelayan kecil” versus “nelayan besar” cukup sering terjadi, misalnya konflik antara nelayan kecil dengan “nelayan *trawl*” pada masa silam atau konflik antara “nelayan tradisional” dengan “nelayan modern” di Balikpapan (Kinseng, 2011). Dengan demikian, jika ditemukan kelas sosial nelayan berbasis “penguasaan alat produksi” semacam ini, maka ia merupakan suatu potensi konflik atau konflik laten yang harus diwaspadai.

Selanjutnya, konflik perikanan seringkali terjadi antara para nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berbeda, sekalipun mereka sebenarnya bisa dikatakan “satu kelas” jika dilihat dari penguasaan alat produksi. Konflik sosial ini dikenal dengan berbagai istilah seperti “konflik alat tangkap” atau “konflik teknologi” atau “perang alat tangkap” (*gear wars*). Ini memang salah satu kekhasan komunitas nelayan, yaitu adanya kelompok-kelompok sosial yang berbasis jenis alat tangkap. Merujuk pada teori konflik Dahrendorf, kelompok-kelompok sosial ini merupakan “*quasi group*” yang setiap waktu bisa berubah menjadi “*conflict group*” manakala ada pemicunya. Kekhasan komunitas nelayan lainnya adalah bahwa pada dasarnya persaingan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan itu terjadi antar (para) nelayan di satu perahu tangkap dengan (para) nelayan di perahu tangkap yang lain atau “persaingan antar perahu” nelayan. Keadaan ini semakin mempermudah terjadinya konflik antara nelayan tersebut. Adanya alat tangkap yang berbeda cara penggunaannya, khususnya alat tangkap yang menetap dan alat tangkap yang “berjalan” (ditarik) sangat penting diperhatikan, karena hal ini seringkali memicu konflik antara nelayan. Dengan demikian, adanya kelompok-kelompok nelayan berdasarkan jenis alat tangkap yang berbeda merupakan suatu potensi konflik yang penting.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Dahrendorf berpendapat bahwa kekuasaan atau otoritas merupakan sumber konflik dalam sebuah organisasi sosial (*JCA*). Organisasi sosial (*JCA*) ini mulai dari skala kecil hingga skala besar yaitu masyarakat atau negara, sepanjang di dalamnya ada pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas dan ada pihak yang tidak memiliki kekuasaan atau otoritas. Merujuk pada pandangan Dahrendorf ini, maka dalam pengelolaan terumbu karang, adanya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan atau otoritas dan pihak-pihak yang tidak mempunyai otoritas dalam pengelolaan terumbu karang tersebut merupakan suatu potensi konflik. Selain masalah “perebutan kekuasaan” atas sumberdaya perikanan itu, masalah akses pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut juga menjadi isu penting yang dapat memicu konflik antara kedua belah pihak di sini.

Sejalan dengan itu, potensi konflik dapat pula dideteksi berdasarkan isu pemicu konfliknya. Dalam pengelolaan sumberdaya alam, termasuk terumbu karang, isu yang paling dominan adalah akses terhadap sumberdaya alam tersebut. Berbagai konflik agraria dan konflik nelayan di Indonesia hampir seluruhnya menyangkut isu akses terhadap lahan atau sumberdaya perikanan. Pada umumnya konflik-konflik tersebut terjadi karena ada kelompok masyarakat yang tereksklusi atau tidak mendapat akses terhadap sumberdaya alam. Kemungkinan pecahnya konflik, dan cenderung berupa konflik kekerasan, akan semakin besar manakala kelompok masyarakat yang tereksklusi tersebut adalah mereka yang semula memiliki akses terhadap sumberdaya alam itu, tetapi kemudian tergusur atau dilarang untuk mengakses sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian, adanya proses eksklusi suatu kelompok masyarakat dari sumberdaya perikanan baik oleh pihak pemegang otoritas, oleh “kelas atas” maupun oleh sesama kelompok masyarakat, merupakan satu potensi konflik yang signifikan. Proses eksklusi ini bisa terjadi akibat penerapan suatu kebijakan, misalnya penetapan kawasan konservasi di wilayah tangkap nelayan.

“Indikator” untuk mendeteksi konflik laten yang diuraikan di atas dapat dikatakan lebih bersifat “objektif”, karena merupakan gejala-gejala sosial atau “fakta sosial” yang dapat diamati. Selain itu, gejala sosial yang lebih bersifat “subjektif” penting pula dihimpun untuk mendeteksi potensi konflik. Seperti diketahui, konflik berkaitan erat dengan soal persepsi dan perasaan. Seperti dikemukakan sebelumnya, masalah persepsi dan perasaan ini juga ditekankan dalam pengertian konflik yang dikemukakan oleh Fisher dkk (2001) maupun Pruitt dan Rubin (2004). Bagaimana cara orang membingkai (*framing*) atau

“mendefinisi situasi” dapat menyebabkan konflik. Persepsi negatif suatu kelompok tentang kelompok yang lain, atau perasaan dieksploitasi, misalnya, seringkali menjadi pemicu konflik. Konflik seringkali pecah karena ada pihak yang merasa tidak adil atau “dilecehan harga diri”. Di wilayah Kepulauan Seribu, misalnya, sekelompok nelayan yang menggunakan alat tangkap muro ami merasa tidak adil karena mereka dilarang masuk ke zona tertentu, sedangkan para pemandu wisata diperbolehkan membawa wisatawan ke zona tersebut (Erwianto, 2013). Dengan demikian, sebenarnya ada konflik laten antara para nelayan tersebut dengan para pemandu wisata maupun pihak yang berwenang.

Dari uraian ini, nampak bahwa indikator yang bersifat subjektif atau dimensi psikologis ini sangat penting untuk dideteksi. Adanya sikap dan perasaan negatif sekelompok orang terhadap pihak yang lain, apalagi jika ia menyebar luas di kalangan anggota masyarakat, merupakan potensi konflik atau konflik laten yang perlu diperhatikan.

Analisis Konflik

Fisher dkk (2001) memandang bahwa analisis konflik merupakan suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan. Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik yang sederhana, praktis dan sesuai. Sementara itu, Antonia Engel dan Benedikt Korf (2005) mengatakan bahwa analisis konflik itu perlu dilakukan karena ia dapat membantu untuk:

- mengklarifikasi dan membuat prioritas isu-isu yang perlu diselesaikan,
- mengidentifikasi dampak konflik,
- mengidentifikasi akar penyebab dan faktor yang berkontribusi pada konflik untuk menentukan respon yang tepat,
- memahami motivasi dan insentif para pihak melalui pemahaman terhadap kepentingan, kebutuhan dan pandangan mereka tentang konflik,
- memahami sifat hubungan diantara para pihak, termasuk kesediaan dan kemampuan mereka bernegosiasi satu sama lain,
- mengidentifikasi informasi yang ada mengenai konflik dan informasi apa yang diperlukan lebih lanjut,

- mengevaluasi kapasitas institusi-institusi dan praktek pengelolaan konflik yang ada dalam menangani konflik,
- membangun hubungan baik dan pengertian diantara para pihak, dimana mungkin,
- meningkatkan ketrampilan menyelesaikan masalah dan analisis para pihak dalam menangani konflik yang ada pada saat ini maupun masa yang akan datang (peningkatan kapasitas merupakan bagian penting dari analisis konflik partisipatif),
- meningkatkan pemahaman keterkaitan antara konteks sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas dengan konflik pemanfaatan sumberdaya.

Selanjutnya, menurut Engel dan Korf (2005), prinsip-prinsip penuntun analisis konflik adalah sebagai berikut:

1. Suatu analisis konflik mesti berbasis pada pandangan yang luas mengenai sumber-sumber konflik. Konflik adalah tentang persepsi dan makna yang diberikan orang terhadap kejadian, kebijakan dan institusi.
2. Suatu analisis konflik membantu para pihak untuk mempertimbangkan kembali pandangan mereka, yang seringkali sangat dipengaruhi oleh emosi, kesalah pahaman, asumsi, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam situasi konflik, emosi dapat dengan mudah menutupi logika dan nalar. Karena itu perlu membedakan antara opini dengan fakta. Menyeimbangkan antara emosi dan penalaran merupakan aspek penting dari pengelolaan konflik, hukan karena fakta lebih penting dari persepsi atau perasaan, tetapi karena para pihak menghadapinya dengan cara yang berbeda.

Transformasi cara pandang ini penting untuk menciptakan ruang bagi kolaborasi dalam pengelolaan konflik. Ia merupakan langkah penting untuk meninggalkan posisi yang kaku dan tidak fleksibel terhadap upaya mencari kemungkinan kepentingan bersama. Ini merupakan hasil analisis yang penting, yang akan menentukan jalan mana yang terbuka bagi negosiasi dan mengidentifikasi kebutuhan atau tujuan bersama yang dapat dipenuhi melalui kolaborasi.

3. Analisis konflik mesti mengkaji konteks pembangunan yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik) dan tidak hanya memperhatikan masalah pengelolaan sumberdaya alam.

4. Setiap analisis konflik bersifat awal (*preliminary*) dan harus disempurnakan dan dikaji secara saksama seiring dengan berlangsungnya proses.
5. Analisis konflik tidak berakhir pada dirinya sendiri. Ia merupakan bagian dari proses menentukan dan belajar tentang isu-isu (peningkatan kapasitas). Agar proses belajar ini terjadi, analisis konflik harus dilaksanakan dengan cara yang partisipatif. Melalui pertukaran informasi, kemungkinan besar orang akan fokus pada masalah yang riil dalam proses negosiasi.
6. Adalah penting untuk mengetahui apa yang perlu untuk diketahui. Tipe dan jumlah informasi yang diperlukan dari analisis konflik bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Sementara ada asumsi bahwa lebih banyak informasi adalah lebih baik, tetapi sebenarnya tidak semua informasi relevan, dapat dipercaya dan berguna.

Box 1. Pertanyaan Kunci untuk Membantu Analisis Konflik

Mengenai apa konflik ini?

Suatu konflik seringkali lebih rumit daripada kelihatannya. Bagaimana para partisipan membingkai konflik? Sejauhmana pandangan mereka memiliki kesamaan, dan bagaimana perbedaan pandangan mereka? Bagaimana pihak lain membingkai konflik? Apa yang nampaknya menjadi faktor di belakang konflik itu? Apakah ada masalah yang lebih mendalam menyangkut penghidupan, institusi, politik atau faktor struktural di belakang konflik ini? Mencoba mengelola konflik sebagai suatu kejadian tunggal dan terisolasi mungkin hanya sedikit manfaatnya jika ia berkaitan dengan masalah atau isu yang lebih luas.

Siapa yang terlibat dalam konflik?

Membangun konsensus yang efektif tergantung pada pelibatan seluruh pihak yang relevan pada konflik tsb. Oleh sebab itu, penting untuk mengidentifikasi para pihak secara akurat. Apakah ada kelompok yang tidak hadir tetapi mempunyai peranan baik langsung maupun tidak pada konflik, seperti administrator, pengguna sumberdaya dari komunitas tetangga atau penduduk yang berpindah-pindah?

Apa motivasi atau insentif yang ada bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik?

Mencoba mengajak orang untuk menyelesaikan konflik melalui pengelolaan konflik alternatif atau cara lain mungkin sulit jika para pihak tidak merasa atau menganggap perlu untuk mengelola atau menyelesaikannya. Selain itu, mungkin ada insentif ekonomi, politik, budaya atau lainnya yang mempengaruhi kemauan para pihak untuk terlibat dalam pengelolaan konflik. Sama pentingnya adalah menemukan apakah ada orang yang diuntungkan dengan keberlanjutan konflik, atau menolak upaya untuk menghentikan konflik (apakah ada yang memiliki kepentingan dengan keberlanjutan konflik?).

Strategi pengelolaan konflik apa yang telah dicoba di masa yang lalu?

Penting sekali untuk mempertimbangkan strategi apa yang telah dicoba untuk menyelesaikan konflik. Apa hasil dari upaya tersebut? Apa kelebihan atau kekurangan upaya menggunakan strategi yang sama pada konflik yang sekarang?

Sumber: Engel and Korf (2005)

Alat-alat dalam Analisis Konflik

Menurut Engel and Korf, konflik dapat dianalisis dengan bantuan alat-alat yang sederhana, praktis dan dapat diadaptasi. Berikut adalah alat bantu analisis konflik yang dikemukakan oleh Engel dan Korf.

Tabel 12.4. Alat Analisis Konflik

No	Alat	Tujuan
1	Analisis akar penyebab	Membantu para pihak mengkaji sumber dan penyebab konflik. Analisis ini membantu untuk memperlihatkan keterkaitan antar berbagai faktor dan penyebab yang berbeda yang telah memicu konflik. Ia membantu membuat rantai sebab-akibat yang sederhana, yang menunjukkan dinamika mendasar suatu konflik.

Tabel 12.4. Alat Analisis Konflik (lanjutan)

No	Alat	Tujuan
2	Analisis isu	Untuk mengkaji isu-isu yang punya kontribusi pada konflik dan isu spesifik yang meyebabkan konflik tertentu secara lebih rinci, berpusat pada lima kategori: 1). masalah dengan informasi; 2). kepentingan-kepentingan yang bertentangan; 3). hubungan yang sulit; 4). kesenjangan struktural; 5). nilai-nilai yang bertentangan.
3	Identifikasi dan analisis para pihak (<i>stakeholders</i>)	Untuk mengidentifikasi dan menilai ketergantungan dan kekuasaan dari para pihak dalam konflik itu. Dengan kata lain, analisis ini membantu mengidentifikasi dan menilai kekuasaan dan pengaruh dari masing-masing pihak dalam suatu konflik.
4	Analisis 4R (rights, responsibilities, returns, relationships)	Mengkaji hak (<i>rights</i>), tanggung jawab (<i>responsibilities</i>) dan keuntungan pihak yang berbeda dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, sebagai bagian dari pemahaman yang lebih baik terhadap konflik. Mengkaji hubungan diantara maupun di dalam kelompok dari pihak-pihak yang berbeda.
5	Urutan waktu konflik	Membantu para pihak dalam mengkaji sejarah dari suatu konflik dan untuk memperbaiki pemahaman mereka terhadap urutan kejadian yang menyebabkan konflik. Urutan waktu konflik ini memungkinkan untuk mempelajari tahap-tahap suatu konflik, bagaimana peristiwa tertentu terjadi dan, mungkin, tindakan yang mana oleh siapa penyebab peristiwa tersebut.
6	Pemetaan konflik mengenai pemanfaatan sumberdaya	Untuk menunjukkan secara geografis dimana konflik pemanfaatan tanah atau sumberdaya terjadi atau mungkin terjadi di masa yang akan datang. Untuk menentukan isu utama konflik.

Sumber: Engel and Korf (2005)

Sementara itu, Fisher dkk (2001) mengemukakan ada sembilan alat analisis konflik, yakni:

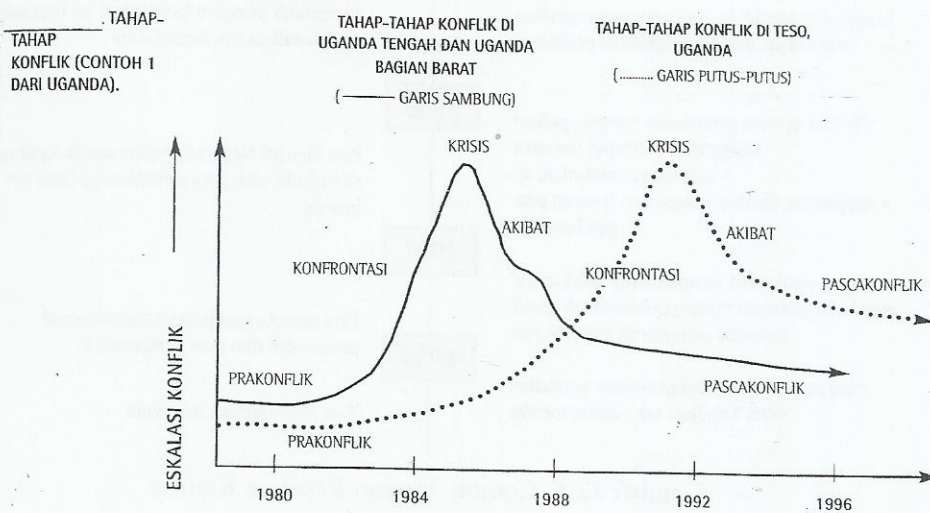
1. Penahapan konflik
2. Urutan kejadian
3. Pemetaan konflik
4. Segitiga SPK
5. Analogi bawang bombay (atau donat)
6. Pohon konflik
7. Analisis kekuatan konflik

8. Analogi pilar
9. Piramida.

Berikut ini akan diuraikan secara ringkas hanya empat alat bantu saja dari sembilan alat bantu analisis konflik tersebut. Saya memilih empat alat bantu ini yang menurut hemat saya lebih sederhana namun sangat menolong untuk memahami dan mengelola konflik.

1. Penahapan konflik.

Seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu, Fisher dkk menjelaskan ada lima tahap konflik, yakni prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik. Dijelaskan bahwa konflik itu berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap tahap ini penting sekali diketahui dan digunakan bersama alat bantu lain untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik.



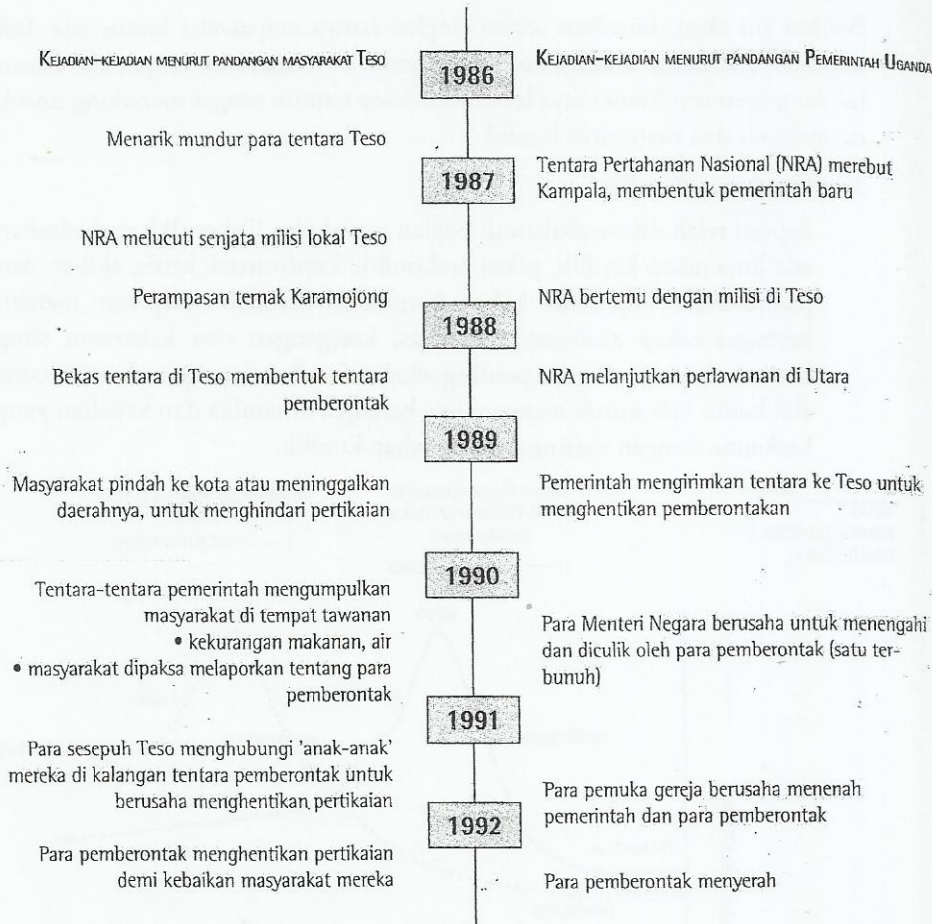
Gambar 12.4. Contoh Penahapan Konflik

Sumber: Fisher dkk, 2001

2. Urutan kejadian.

Alat bantu ini sederhana saja; ia berupa grafik yang menunjukkan urutan kejadian secara krolologis dalam rentang waktu bisa tahun, bulan atau hari. Dijelaskan oleh Fisher dkk bahwa tujuan penggunaan urutan kejadian ini bukanlah untuk mendapatkan sejarah kejadian yang “benar” atau “objektif”, tetapi untuk memahami pandangan orang-orang yang terlibat dalam suatu konflik.

1. URUTAN KEJADIAN (CONTOH 3 DARI UGANDA).



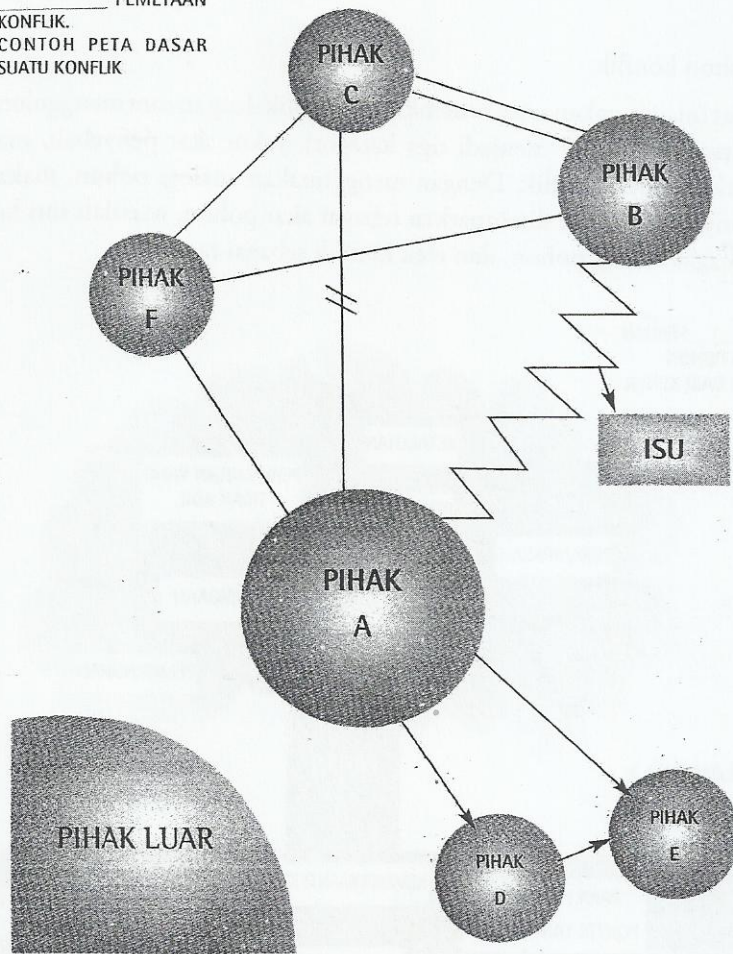
Gambar 12.5. Contoh Urutan Kejadian Konflik

Sumber: Fisher dkk, 2001

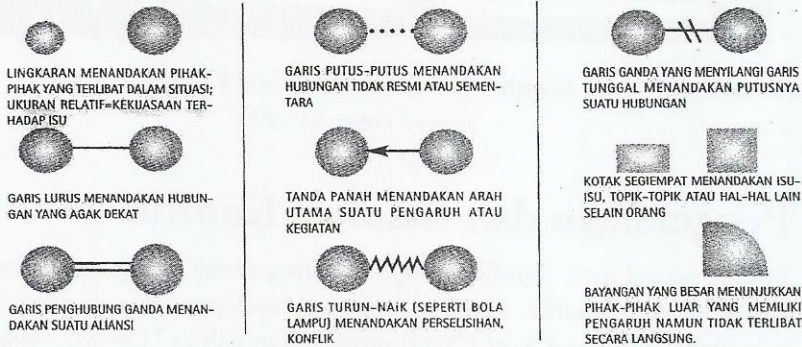
3. Pemetaan konflik.

Pemetaan konflik merupakan teknik untuk menggambarkan konflik secara grafis; mencakup pihak-pihak atau aktor yang terlibat dalam konflik dan hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antar pihak ini meliputi hubungan konflik maupun kolaborasi atau kerjasama.

PEMETAAN
KONFLIK.
CONTOH PETA DASAR
SUATU KONFLIK



KUNCI: Dalam pemetaan, kami menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Anda mungkin ingin membuat kaidah anda sendiri.



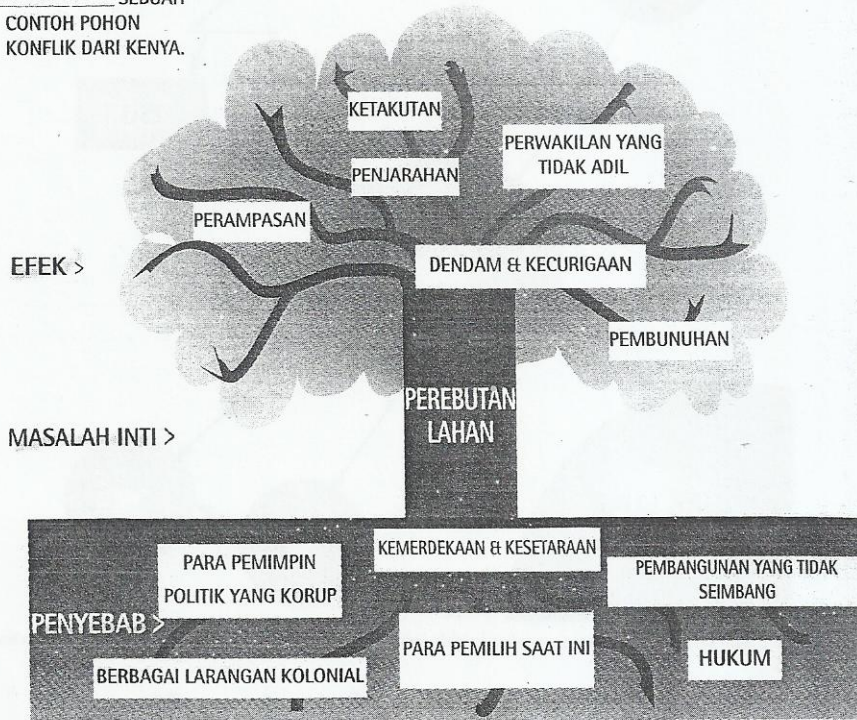
Gambar 12.6. Contoh Pemetaan Konflik

Sumber: Fisher dkk, 2001

4. Pohon konflik.

Alat ini digunakan untuk memahami konflik dengan cara menggolongkan persoalan konflik menjadi tiga kategori, yakni akar penyebab, masalah inti dan efek konflik. Dengan menggunakan analogi pohon, maka akar penyebab konflik ditempatkan sebagai akar pohon, masalah inti konflik sebagai batang pohon, dan efek konflik sebagai ranting.

SEBUAH
CONTOH POHON
KONFLIK DARI KENYA.



Gambar 12.7. Contoh Pohon Konflik

Sumber: Fisher dkk, 2001

Pengelolaan dan Resolusi Konflik

Istilah pengelolaan konflik (*conflict management*) dengan resolusi atau “penyelesaian” konflik (*conflict resolution*) mempunyai arti yang berbeda tentunya. Engel and Korf (2005) menjelaskan bahwa “*Conflict management is the practice of identifying and handling conflicts in a sensible, fair and efficient*

manner that prevents them from escalating out of control and becoming violent". Sementara itu, mereka mengatakan bahwa "*Conflict resolution deals with process-oriented activities that aim to address and resolve the deep-rooted and underlying causes of conflict*". Tokoh teori konflik, Ralf Dahrendorf, menolak penggunaan istilah "resolusi konflik", karena istilah itu memberi pengertian bahwa seolah-olah konflik itu bisa dihilangkan secara menyeluruh (tuntas). Dahrendorf menawarkan istilah "*regulation*" atau "pengaturan" konflik sosial, yang merujuk pada bentuk-bentuk pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini ditujukan untuk mengatasi "ekspresi" atau bentuk perwujudan suatu konflik ketimbang mengatasi akar penyebab suatu konflik, karena Dahrendorf percaya bahwa pertentangan kepentingan dan kelomok kepentingan itu terus ada dalam masyarakat (Dahrendorf, 1963:224-225).

Menurut Dahrendorf, ada tiga faktor penting sebagai prasyarat agar pengaturan konflik itu berjalan efektif. Faktor yang pertama adalah kedua belah pihak mesti mengakui realitas dari situasi konflik itu, dan mengakui bahwa pihak "lawan" mempunyai alasan yang sah dalam perjuangannya itu. Ketika ada upaya untuk menolak alasan pihak lawan dengan mengatakan itu "tidak realistis", atau menolak hak pihak lawan dalam perjuangan itu, maka pengaturan konflik tidak akan efektif. Faktor kedua adalah organisasi kelompok kepentingan. Jika pihak-pihak yang berkonflik itu "cerai-berai" tidak terorganisir, maka pengaturan konflik menjadi sangat sulit. Faktor ketiga, agar pengaturan konflik bisa berjalan efektif, maka kedua belah pihak mesti sepakat atas "aturan main" yang menjadi acuan relasi mereka. Aturan atau rules ini umumnya akan mempermudah pengaturan konflik.

Menurut Dahrendorf, bentuk pengaturan konflik yang pertama dan terpenting adalah berfungsinya suatu institusi yang menyediakan acuan untuk berdialog dan membuat keputusan mengenai isu-isu yang bertentangan. Namun demikian, kehadiran institusi semacam ini tidak menjamin bahwa konflik yang bersifat brutal (*violent*) akan dapat dihindari sepenuhnya. Oleh sebab itu, selain "konsiliasi otonom" yang dilakukan melalui institusi tersebut, bentuk pengaturan konflik lainnya juga diperlukan, yakni mediasi dan arbitrase. Menurut Dahrendorf, konsiliasi, mediasi dan arbitrase merupakan mekanisme pengaturan konflik yang penting dalam rangka mengurangi konflik yang bersifat brutal.

Pruitt dan Rubin (2004) menjelaskan bahwa ada lima strategi dasar yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kelima strategi tersebut

adalah: *contending* (“bertanding” atau “beradu”), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam). Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa tiga strategi pertama, yakni *contending*, *yielding*, dan *problem solving* dapat dikatakan sebagai “strategi untuk mengatasi konflik”, sedangkan dua strategi terakhir, yaitu *withdrawing* dan *inaction* bukan merupakan upaya untuk mengatasi konflik melainkan upaya “untuk menghentikan atau mengabaikan konflik” (Pruitt dan Rubin, 2004:7).

Sementara itu, Kriesberg (2003) menjelaskan tiga jenis tindakan dasar yang umumnya dikenal dalam konflik, yakni koersif (paksaan/kekerasan), reward (penghargaan), dan persuasi. Menurut Kriesberg, penggunaan koersif cenderung memperluas konflik, mendorong sifat destruktif, dan kadangkala memperpanjang konflik. Sementara itu, pemberian reward seringkali lebih efektif daripada pemberian hukuman. Menurut Kriesberg, reward atau sanksi positif lebih tepat dan efektif diberikan pada tahap akhir suatu konflik daripada di saat eskalasi dan puncak konflik. Reward ini bisa berupa uang, tanah, atau pekerjaan; maupun yang bersifat non-material seperti pengakuan status. Selanjutnya, persuasi. Menurut Kriesberg, upaya persuasi cenderung lebih efektif dilakukan pada tahap awal konflik, sebelum saling tidak percaya antara kedua pihak berkembang lebih jauh. Upaya persuasi dapat didasarkan pada seruan atas nilai-nilai bersama seperti keadilan atau kebebasan.

Selanjutnya, Engel and Korf (2005) menjelaskan ragam pengelolaan konflik berupa kontinum mulai dari *avoidance* (menghindar) pada ekstrim yang satu hingga *physical violence* (kekerasan fisik) pada ekstrim yang lain. Lebih jauh dijelaskan beragam pilihan pengelolaan konflik tersebut sebagai berikut:

Avoidance (menghindar): tindakan yang mencegah atau menghindar terjadinya konflik.

Negotiation (negosiasi): proses tawar-menawar yang dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus. Konsensus berarti suatu keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Mediation (mediasi): menggunakan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses negosiasi. Pihak mediator tidak memiliki otoritas untuk memaksakan keputusan.

Arbitration (arbitrasi): menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga, yang akan membuat keputusan bagi pihak yang berkonflik, meski seringkali tidak bersifat mengikat.

Adjudication (ajudikasi): bersandar pada keputusan hakim atau administrator untuk membuat keputusan yang mengikat.

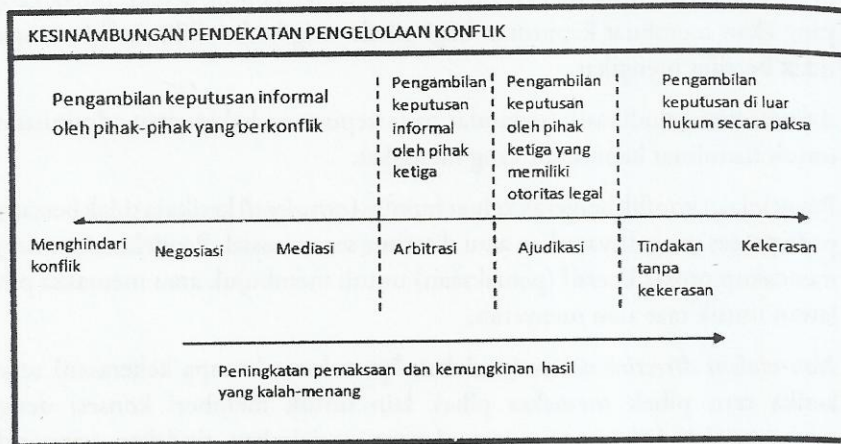
Pengelolaan konflik bergerak keluar hukum (*extralegal*) ketika ia tidak bersandar pada proses yang disyaratkan atau diterima secara sosial. Pendekatan *extralegal* mencakup proses koersif (pemaksaan) untuk membujuk atau memaksa pihak lawan untuk taat atau menyerah.

Non-violent directive action (tindakan “pemaksaan” tanpa kekerasan) terjadi ketika satu pihak memaksa pihak lain untuk memberi konsesi dengan cara menolak bekerjasama atau dengan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Hal ini mungkin dilakukan ketika pihak-pihak yang berkonflik saling tergantung satu sama lain bagi kesejahteraan dan penghidupannya.

Violence or physical coercion (kekerasan fisik) artinya satu pihak mengancam atau menggunakan kekuatan untuk memaksa keinginannya kepada pihak lain. *Coercion* (koersi) berarti satu pihak dipaksa untuk menerima hasil yang dipaksakan oleh pihak lain.

Beragam pendekatan pengelolaan konflik yang dikemukakan oleh Eneg dan Korf ini pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Castro and Nielsen (2003). Mereka menjelaskan bahwa prosedur mendasar dalam menangani konflik terdiri atas enam metode, yakni: *avoidance* (penghindaran), yaitu tindakan untuk menjaga agar konflik tidak muncul secara terbuka; *coercion* (pemaksaan), yaitu tindakan pemaksaan kehendak seseorang melalui ancaman atau kekuatan, termasuk kekerasan, protes, dominasi ekonomi, dan kontrak politik; *negotiation* (negosiasi), yaitu mengikuti proses secara sukarela dimana pihak berkonflik mencapai kesepakatan melalui konsensus; *mediation* (mediasi), yaitu menggunakan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses negosiasi; *arbitration* (arbitrasi), menyerahkan konflik kepada pihak ketiga yang disepakati, yang akan membuat keputusan; dan *adjudication* (ajudikasi), yaitu menyandarkan pada hakim atau administrator untuk membuat keputusan yang mengikat.

Beragam pendekatan dalam mengelola konflik tersebut disajikan secara ringkas pada Gambar 8.



Gambar 12.8. Pendekatan Pengelolaan Konflik.

Sumber: Moore, 2003 dikutip dalam Engel and Korf, 2005.

Selanjutnya, menurut Engel and Korf (2005), selain pendekatan pengelolaan konflik di atas, ada sistem pengelolaan konflik lain yang melibatkan pihak ketiga, antara lain istem adat dan metode pengelolaan konflik alternatif (ACM = *Alternative Conflict Management*). Menurut mereka, metode pengelolaan konflik ini berbeda dalam pendekatan yang diterapkan dan kapasitas “pemaksaan” (*enforcement*) yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk membuat pihak-pihak yang berkonflik mematuhi penyelesaian yang dibuat. Berikut penjelasan Engel and Korf tentang masing-masing metode pengelolaan konflik tersebut.

1. Sistem adat.

Ada beragam strategi dan teknik mengelola dan menyelesaikan konflik yang terdapat dalam adat istiadat suatu masyarakat atau komunitas. Beragam metode tersebut mencakup negosiasi, mediasi dan arbitrasi, maupun metode yang bersifat memaksa seperti tekanan dari sesama anggota kelompok, gosip, pengucilan, sanksi yang bersifat supernatural hingga kekerasan.

Keberhasilan pengelolaan konflik dari suatu sistem adat seringkali tergantung pada kapasitas “pemaksaan” (*enforcement*) dari otoritas tradisional dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Ketika otoritas kelompok elit tradisional memudar, kapasitas mereka untuk “memaksa” implementasi keputusan penyelesaian konflik mungkin berkurang pula.

Sistem adat ini memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mengelola konflik, seperti disajikan pada Tabel 5.

Tabel 12.5. Kekuatan dan Keterbatasan Sistem Adat dalam Mengelola Konflik

Kekuatan	Keterbatasan
Mendorong partisipasi anggota komunitas, dan menghormati nilai-nilai dan kebiasaan lokal.	Telah diganti dengan sistem hukum pengadilan dan administrasi.
Lebih dapat diakses karena biaya yang murah, fleksibel dalam skedul dan prosedur, dan penggunaan bahasa lokal.	Bisa tidak dapat diakses oleh orang atas dasar gender, klas, kasta dan faktor-faktor yang lain.
Mendorong pengambilan keputusan yang berbasis kolaborasi, dengan konsensus muncul dari diskusi yang luas, yang seringkali mendorong rekonsiliasi.	Ditantang oleh semakin meningkatnya keragaman komunitas akibat dari perubahan kultural, gerak penduduk dan faktor-faktor lain yang menggerus hubungan sosial yang mendukung sistem adat dalam pengelolaan konflik.
Memberi kontribusi bagi proses pemberdayaan komunitas.	Seringkali tidak dapat mengakomodasi konflik antar komunitas atau konflik antara suatu komunitas dengan negara.
Pemimpin informal bahkan formal dapat berperan sebagai konsiliator, mediator, negosiator, atau arbitrator.	Para pemimpin lokal bisa menggunakan otoritas mereka untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, atau kepentingan kroni/klien mereka.
Legitimasi publik yang telah berlangsung lama menyediakan rasa memiliki secara lokal, baik prosesnya maupun hasilnya.	Keputusan dan proses mungkin tidak ditulis untuk dijadikan sebagai rujukan di masa yang akan datang.

Sumber: Engel and Korf (2005)

2. Pengelolaan Konflik Alternatif (ACM)

Selain sistem adat, ada pula metode pengelolaan konflik alternatif berupa sistem pengelolaan konflik kolaboratif. Pengelolaan konflik kolaboratif mendorong pengambilan keputusan secara bersama dan mengupayakan kesepakatan yang bersifat suka rela. Pendekatan ini menekankan penyelesaian yang bersifat "sama-sama menang" (*win-win solution*). Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap penanganan konflik yang

berbasis pada kekuasaan atau aturan-aturan hukum formal semata, yang menghasilkan pihak yang menang dan yang kalah. Selanjutnya, oleh karena pengelolaan konflik kolaboratif ini berbasis kesepakatan suka rela, maka pelaksanaannya bergantung pada kesediaan semua pihak untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Pihak ketiga mungkin memfasilitasi proses ini, tetapi tidak dapat memaksa pihak yang berkonflik untuk melaksanakan kesepakatan yang dibuat. Oleh sebab itu, pengelolaan konflik kolaboratif ini idealnya dilaksanakan ketika pihak-pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan yang relatif sama.

Tabel 12.6. Kekuatan dan Keterbatasan Metode Pengelolaan Konflik Alternatif

Kekuatan	Keterbatasan
Dapat mengatasi hambatan bagi pengelolaan konflik partisipatif yang melekat pada legislatif, administratif, peradilan bahkan hukum adat.	Seringkali gagal menyentuh masalah kesenjangan struktural, dan bisa berfungsi melanggengkan atau memperparah ketidakseimbangan kekuasaan.
Mendorong pengelolaan konflik dengan membangun berdasarkan kepentingan bersama dan menemukan titik kesepakatan.	Mungkin mengalami kesulitan untuk membawa semua pihak ke meja perundingan.
Melibatkan proses yang sejalan dengan yang telah ada pada sebagian besar sistem pengelolaan konflik lokal, termasuk fleksibel dan biaya yang murah.	Mungkin tidak mampu mengatasi perbedaan kekuasaan diantara para pihak, sehingga kelompok rentan seperti orang miskin, perempuan dan penduduk asli tetap termarginalisasi.
Menumbuhkan rasa memiliki terhadap implementasi dari proses penyelesaian yang dibuat.	Mungkin menghasilkan keputusan yang tidak mengikat secara legal.
Penekanan pada peningkatan kapasitas di dalam komunitas sehingga masyarakat lokal menjadi fasilitator, komunikator, perencana dan manejer konflik yang efektif.	Mungkin membuat sebagian praktisi menggunakan metode-metode yang dibangun di konteks dan budaya lain tanpa mengadaptasinya ke konteks lokal.

Sumber: Engel and Korf (2005).

Seperti dikemukakan sebelumnya, Dahrendorf tidak setuju penggunaan istilah "resolusi konflik", yang menyiratkan bahwa konflik itu bisa dan perlu dihilangkan sepenuhnya. Dahrendorf mengatakan "*The concept of conflict resolution will be rejected as reflecting a sociologically mistaken ideology according to which complete elimination of conflict is possible and desirable*" (Dahrendorf, 1963:224). Hemat saya, "resolusi konflik" dalam arti yang dikemukakan Dahrendorf itu memang tidak mungkin tercapai di dalam masyarakat secara keseluruhan, mengingat sumber konflik itu amat beragam. Namun berbeda dengan Dahrendorf, saya berpandangan bahwa untuk kasus-kasus konflik yang spesifik, resolusi konflik sangat mungkin dicapai, dan juga diinginkan untuk dicapai. Sebagai contoh, resolusi konflik untuk kasus konflik antara nelayan "tradisional" dengan nelayan *trawl* di Indonesia, memang diinginkan dan secara umum dapat dikatakan telah tercapai, melalui peraturan dari Pemerintah (Keppres No. 39/1980 tentang pelarangan *trawl*).

Beragam teknik atau pendekatan pengelolaan konflik yang diuraikan pada bagian ini mungkin saja menghasilkan resolusi (penyelesaian) konflik untuk kasus-kasus konflik tertentu. Dengan kata lain, untuk kasus-kasus konflik spesifik, maka resolusi konflik itu, meminjam istilah Dahrendorf, "*is possible and desirable*".

Daftar Pustaka

- Broom, Leonard and Philip Selznick, 1975. *Essentials of Sociology*. Harper & Row, Publishers, Inc. New York, USA.
- Castro, A. Peter and Erik Nielsen (eds), 2003. *Natural Resource Conflict Management Case Studies: An Analysis of Power, Participation and Protected Areas*. Food and
- Coser, Lewis A., 1964. *The Functions of Social Conflict*. The Free Press, New York, USA.
- _____, 1977. *Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context* (Second Ed). Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Charon, Joel M., 2001. *Ten Questions. A Sociological Perspective* (Fourth Edition). Wadsworth, Thomson Learning.
- Dahrendorf, Ralf, 1963. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press, Stanford, California.

- _____, 1973. "Toward a Theory of Social Conflict" in Etzioni, Amitai and Eva Etzioni-Halevy (eds), 1973. *Social Change. Sources, Patterns, and Consequences* (second edition), Basic Books, Inc., Publishers, New York, USA.
- Engel, Antonia and Benedikt Korf, 2005. *Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource Management*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Erwiantono, 2013. *Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Areal Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta*. Disertasi pada Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Fisher, Simon dkk, 2001. *Mengelola Konflik. Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Alih Bahasa oleh S.N. Kartikasari dkk. Zed Books, The British Council.
- Hamilton, Malcolm and Maria Hirszowicz, 1987. *Class and Inequality in Pre-Industrial, Capitalist and Communist Societies*. Wheatsheaf Books-Sussex, St. Martin's Press-New York.
- Homer-Dixon, Thomas F., 1999. *Environment, Scarcity, and Violence*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Kinseng, Rilus A., 2011. *Konflik Kelas Nelayan di Indonesia. Tinjauan Kasus Balikpapan*. IPB Press, IPB, Bogor, Indonesia.
- Kriesberg, Louis, 2003. *Constructive Conflicts. From Escalation to Resolution*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Lulofs, Roxane S. and Dudley D. Cahn, 2000. *Conflict. From Theory to Action (Second Edition)*. Allyn and Bacon, Needham heights, MA.
- MacNeil, Jim, Pieter Winsemius and Taizo Yakushiji, 1991. *Beyond Interdependence. The Meshing of the World's Economy and the Earth's Ecology*. Oxford University Press, New York, USA.
- Marx, Karl and Frederick Engels, 1948/1991. *The Communist Manifesto*. International Publishers, New York.
- Oberschall, Anthony, 1978. Theories of Social Conflict. *Annual Review of Sociology*, Vol 4 (1978), 291-315.

- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, 2004. *Teori Konflik Sosial*. Diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ross, Marc Howard, 2007. *Cultural Contestation in Ethnic Conflict*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Simmel, Georg, 1966. *Conflict* (translated by Kurt H. Wolff). *The Web of Group-Affiliations* (translated by Reinhard Bendix). The Free Press, New York.
- Stavenhagen, Rodolfo, 1975. *Social Classes in Agrarian Societies* (trans. by Judy Alder Hellman). Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York.
- Suseno, Franz Magnis, 2001. *Pemikiran Karl Marx. Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*.
- Turner, Jonathan H., 1998. *The Structure of Sociological Theory* (Fifth Ed), Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.
- Vago, Steven, 1989. *Social Change*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ
- Wallace, Ruth A. and Alison Wolf, 2006. *Contemporary Sociological Theory. Expanding the Classical Tradition* (Sixth Edition). Prentice Hall.
- White, Robert W., 1989. *From Peaceful Protest to Guerrilla War: Micromobilization of the Provisional Irish Republican Army*. *American Journal of Sociology*, Vol.94, No.6, May 1989.
- Wright, Erik Olin, 1987. *Classes*. Verso, London-New York.